



CV REY MEDIA GRAFIKA

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi



Dahlan Tampubolon, PhD
Sayid Abas, S.E., M.Si
Ir. Unang Atmaja, M.Sc
Endri Purnomo, S.E., M.Ak
Dr. Nurhayati, S.E., M.E
Rineliana, S.E., M.E
Heppi Syofya, S.E., M.Si
Mustam, S.P., M.M
Hasanuddin Djumakking, S.E., M.M., CHCGM
Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si

DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI

Penulis:

Dahlan Tampubolon, PhD

Sayid Abas, S.E., M.Si

Ir. Unang Atmaja, M.Sc

Endri Purnomo, S.E., M.Ak

Dr. Nurhayati, S.E., M.E

Rineliana, S.E., M.E

Heppi Syofya, S.E., M.Si

Mustam, S.P., M.M

Hasanuddin Djumakking, S.E., M.M., CHCGM

Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si



CV. REY MEDIA GRAFIKA

PUBLISHER

DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI

Penulis :

Dahlan Tampubolon, PhD
Sayid Abas, S.E., M.Si
Ir. Unang Atmaja, M.Sc
Endri Purnomo, S.E., M.Ak
Dr. Nurhayati, S.E., M.E
Rineliana, S.E., M.E
Heppi Syofya, S.E., M.Si
Mustam, S.P., M.M
Hasanuddin Djumakking, S.E., M.M., CHCGM
Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si

Penyunting dan Desain Cover :
Panji Priantono Putra, S.Kom

Ukuran:
x hal + 234 hal; 14,8cm x 21cm

Diterbitkan Oleh :



CV.REY MEDIA GRAFIKA
PUBLISHER

Jln.Melati, BKG. Palapa, Blok.T No.6
Batam - Indonesia 29432
Email : reymediagrafika.rgm@gmail.com

ISBN : 978-634-7180-32-2
IKAPI: 010/Kepri/2022
Terbitan: April 2025

Hak Cipta Pada Penulis
Hak Cipta dilindungi Undang – Undang

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan
Cara Apapun Tanpa Seizin Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai teori pertumbuhan ekonomi klasik hingga modern, serta melihat bagaimana variabel-variabel seperti investasi, konsumsi, tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan pemerintah saling berinteraksi dalam memengaruhi laju pertumbuhan suatu negara. Selain itu, dibahas pula isu-isu kontemporer seperti ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, dan dampak globalisasi terhadap ekonomi domestik. Buku ini dirancang agar dapat diakses oleh kalangan umum dengan bahasa yang sederhana namun tetap mengedepankan kedalaman analisis.

Pertumbuhan ekonomi bukanlah sebuah proses yang statis, melainkan dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat luas untuk

memiliki pemahaman yang baik mengenai dinamika ini, agar mampu membaca arah kebijakan ekonomi serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Buku ini diharapkan menjadi jembatan pengetahuan bagi siapa saja yang ingin memahami ekonomi secara lebih utuh, tanpa harus memiliki latar belakang akademik ekonomi yang mendalam.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi.....	2
1.3. Indikator Utama Pertumbuhan.....	4
1.3.1. Produk Domestik Bruto	4
1.3.2. Pendapatan Per Kapita.....	7
1.3.3. Indikator Sektoral Pertumbuhan Ekonomi	9
1.4. Indikator Pertumbuhan Inklusif.....	11
1.4.1. Indikator Sosial	11
1.4.2. Pertumbuhan Berkelanjutan	13
1.4.3. Indikator Pertumbuhan Alternatif.....	15
1.5. Analisis Komparatif Indikator Pertumbuhan	16
1.5.1. Komparatif Indikator Pertumbuhan.....	16
1.5.2. Interpretasi dan Limitasi Indikator Pertumbuhan	18
1.6. Penutup.....	20
BAB II FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI	22
2.1. Pendahuluan	22
2.2. Faktor Internal.....	26

2.3.	Faktor Eksternal	27
2.4.	Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi.....	34
2.5.	Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Negara	37
BAB III PERAN INVESTASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI		42
3.1.	Pendahuluan.....	42
3.2.	Kerangka Teoretis Investasi dan Pertumbuhan	43
3.3.	Tipologi Investasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan	46
3.4.	Determinan Kualitas Investasi.....	50
3.5.	Studi Kasus Empiris: Pengalaman Regional dan Global	54
3.6.	Tantangan Kontemporer dalam Optimalisasi Investasi	58
3.7.	Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas dan Dampak Investasi	62
3.8.	Kesimpulan dan Implikasi untuk Pembangunan Ekonomi.....	68
BAB IV INFRASTRUKTUR SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN.....		72
4.1.	Pengertian Infrastruktur	72
4.2.	Hubungan Antara Infrastruktur dan Pertumbuhan	73
4.3.	Peran Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan	75
4.4.	Dampak Ekonomi dari Pembangunan Infrastruktur.....	78

4.5.	Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur	81
4.6.	Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.....	83

**BAB V PERAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI 87**

5.1.	Pendidikan sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi.....	89
5.2.	Dampak Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	91
5.3.	Tantangan dan Hambatan dalam Sektor Pendidikan.....	94
5.4.	Kesehatan sebagai Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi	98
5.5.	Dampak Kesehatan terhadap Produktivitas dan Pembangunan Ekonomi	100
5.6.	Tantangan dalam Pembangunan Kesehatan	105
5.7.	Sinergi antara Pendidikan dan Kesehatan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	107
5.8.	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	111

BAB VI GLOBALISASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 117

6.1.	Pendahuluan	117
6.2.	Konsep Globalisasi Ekonomi.....	119
6.2.1.	Definisi dan Karakteristik Globalisasi Ekonomi	119

6.2.2.	Faktor-Faktor yang Mendorong Globalisasi Ekonomi.....	121
6.2.3.	Perbedaan antara Globalisasi Ekonomi dan Globalisasi Sosial-Budaya	123
6.3.	Dampak Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	124
6.4.	Globalisasi Dan Perdagangan Internasional	129
6.4.1.	Peran Perdagangan Internasional dalam Globalisasi	129
6.4.2.	Teori-Teori Perdagangan Internasional yang Relevan	131
6.4.3.	Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Perdagangan dan Tarif	133
6.5.	Globalisasi Dan Penanaman Modal Asing..	135
6.5.1.	Peran PMA dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi.....	136
6.5.2.	Keuntungan dan Tantangan dari PMA	137
6.5.3.	Dampak terhadap Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Infrastruktur	139
6.6.	Kesimpulan	141

**BAB VII PERAN PEMERINTAH DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI 145**

7.1.	Peran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi	145
7.2.	Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah	147

7.3.	Peran Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	150
7.4.	Tantangan dan Strategi Pemerintah ke Depan dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	152

BAB VIII SEKTOR EKONOMI UTAMA157

8.1.	Definisi dan Klasifikasi Sektor Ekonomi ...	157
8.1.1.	Definisi Sektor Ekonomi.....	157
8.1.2.	Klasifikasi Sektor Ekonomi.....	157
8.2.	Sektor Primer	159
8.2.1.	Pengertian Sektor Primer	159
8.2.2.	Cakupan Sektor Primer	160
8.3.	Sektor Sekunder	162
8.3.1.	Pengertian Sektor Sekunder	162
8.3.2.	Cakupan Kegiatan Sektor Sekunder ..	162
8.3.3.	Peran Sektor Sekunder dalam Ekonomi	163
8.4.	Sektor Tersier.....	164
8.4.1.	Pengertian Sektor Tersier.....	164
8.4.2.	Cakupan Kegiatan Sektor Tersier	164
8.5.	Sektor Kuartener dan Kuinener.....	166
8.6.	Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDB	168
8.6.1.	Pengertian PDB	168
8.6.2.	Kontribusi Menurut Sektor Ekonomi	169

BAB IX PERAN TEKNOLOGI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI173

9.1.	Industri Baru.....	174
9.2.	Peningkatan Efisiensi.....	178

9.3.	Inovasi.....	179
9.4.	Peran Teknologi pada Peningkatan Lapangan Kerja.....	186
9.5.	Teknologi Mengarah pada Standar Hidup yang Lebih Tinggi	188

BAB X KETIMPANGAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA
.....194

11.1.	Pendahuluan.....	194
11.2.	Memahami Lebih Dekat Ketimpangan Ekonomi	197
11.3.	Indikator Ketimpangan Ekonomi	203
11.4.	Dampak Ketimpangan Ekonomi.....	207
11.5.	Strategi Dan Solusi Mengatasi Ketimpangan Ekonomi	212
11.6.	Penutup	216

DAFTAR PUSTAKA.....220

BAB I

INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI

1.1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesuksesan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya. Bab ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang indikator-indikator ini menjadi krusial bagi pembuat kebijakan, akademisi, praktisi bisnis, maupun masyarakat umum. Melalui pengukuran yang akurat dan interpretasi yang tepat, kita dapat menilai kondisi ekonomi saat ini, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta meramalkan arah perkembangan ekonomi di masa depan. Indikator pertumbuhan ekonomi juga memberikan dasar yang kuat untuk perbandingan antarnegara dan antarwaktu, sehingga memungkinkan evaluasi keberhasilan strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan.

Pembahasan tidak hanya terbatas pada indikator

kuantitatif konvensional, tetapi juga mencakup indikator sosial, lingkungan, dan keberlanjutan yang semakin mendapat perhatian dalam diskursus ekonomi modern. Evolusi pemikiran ekonomi telah mendorong pengembangan ukuran-ukuran baru yang berupaya mengatasi keterbatasan indikator tradisional. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing indikator, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan ekonomi dan kemajuan sosial suatu negara. Bab ini akan menuntun pembaca melalui kompleksitas pengukuran pertumbuhan ekonomi, menawarkan kerangka analitis untuk memahami data ekonomi, serta mengeksplorasi implikasi kebijakan dari berbagai indikator pertumbuhan.

1.2. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Ini biasanya diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan output ekonomi dari waktu ke waktu dan seringkali digunakan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi fokus pada peningkatan kuantitatif dalam produksi barang dan jasa, sedangkan pembangunan ekonomi melibatkan perubahan struktural yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi mencakup aspek sosial, kesejahteraan, dan lingkungan, serta pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Dalam perspektif historis, pertumbuhan ekonomi telah dipengaruhi oleh berbagai teori dan paradigma. Paradigma historis mencoba memberikan gagasan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian secara stabil dan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian seringkali menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah resesi ekonomi di Eropa.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi sangat penting karena memberikan indikasi tentang kemajuan suatu negara dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran ini biasanya menggunakan PDB riil untuk menghindari pengaruh inflasi. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan

ekonomi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tetap kuat pada tahun 2023, didukung oleh permintaan domestik yang solid dan investasi infrastruktur.

1.3. Indikator Utama Pertumbuhan

1.3.1. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. PDB mencakup semua produksi yang dilakukan oleh perusahaan domestik maupun asing yang beroperasi di dalam wilayah negara tersebut. PDB memberikan gambaran umum tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan menjadi dasar analisis bagi kebijakan ekonomi dan keputusan investasi.

PDB dapat dihitung menggunakan tiga metode utama:

1. Metode Pendapatan: PDB dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa, termasuk pendapatan karyawan, pengusaha,

sewa, bunga, keuntungan, dan pajak yang dikurangi subsidi.

2. Metode Pengeluaran: PDB dihitung dengan menjumlahkan total pengeluaran untuk barang dan jasa, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.
3. Metode Produksi: PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah pada setiap tahap produksi ekonomi, mencakup sektor pertanian, industri, dan jasa.

PDB nominal mengukur nilai output ekonomi tanpa memperhitungkan inflasi, sedangkan PDB riil memperhitungkan inflasi dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi sebenarnya. PDB riil lebih baik digunakan untuk mengamati kinerja perekonomian karena memperhitungkan perubahan harga.

Meskipun PDB adalah indikator penting, namun memiliki keterbatasan. PDB tidak memberikan gambaran lengkap tentang distribusi pendapatan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, PDB hanya merangkum aktivitas perekonomian dalam satu angka, sehingga tidak mencakup aspek lingkungan dan sosial yang

penting dalam menilai kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, perlu menggunakan indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio gini untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Laju pertumbuhan PDB biasanya diukur menggunakan rumus yang membandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) antara dua periode waktu. Rumus umumnya adalah:

Pertumbuhan Ekonomi

$$= \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Di mana PDB_t adalah PDB pada tahun t , dan PDB_{t-1} adalah PDB pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan jangka pendek sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta fluktuasi pasar. Sementara itu, pertumbuhan jangka panjang lebih terkait dengan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Investasi jangka panjang cenderung memberikan dampak yang lebih stabil dan berkelanjutan pada pertumbuhan ekonomi.

Volatilitas pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan

nilai tukar, inflasi, dan krisis keuangan. Volatilitas ini dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan investasi, karena meningkatkan ketidakpastian dan risiko bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi yang efektif diperlukan untuk mengurangi volatilitas dan mempertahankan pertumbuhan yang stabil.

Pertumbuhan ekonomi sering mengikuti siklus ekonomi, yang terdiri dari fase ekspansi dan kontraksi. Fase ekspansi ditandai dengan peningkatan produksi dan konsumsi, sedangkan fase kontraksi ditandai dengan penurunan aktivitas ekonomi. Siklus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, serta kondisi pasar global. Pemahaman tentang tren dan siklus ini penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif.

1.3.2. Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan rata-rata per orang di suatu negara. PDB per kapita dihitung dengan membagi total PDB dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2025, PDB per kapita Indonesia diperkirakan mencapai sekitar

5.500-5.520 dolar AS. PDB per kapita memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa, tetapi tidak memperhitungkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita adalah indikator yang memperhitungkan pendapatan warga negara di dalam dan luar negeri. PNB per kapita sering disebut sebagai Gross National Income (GNI) per kapita. Pada tahun 2025, GNI per kapita Indonesia diharapkan mencapai 5.500-5.520 dolar AS. PNB per kapita memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pendapatan yang diterima oleh warga negara, termasuk pendapatan dari luar negeri.

Paritas Daya Beli (PPP) adalah konsep yang digunakan untuk membandingkan pendapatan per kapita antar negara dengan memperhitungkan perbedaan harga barang dan jasa di setiap negara. PPP membantu memperhitungkan daya beli yang sebenarnya dari pendapatan per kapita, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih adil antar negara. Dengan menggunakan PPP, perbedaan harga antar negara dapat diabaikan, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih akurat tentang

standar hidup masyarakat.

Perbandingan pendapatan per kapita antar negara seringkali dilakukan untuk menilai kemajuan ekonomi dan standar hidup. Namun, perlu mempertimbangkan metode pengukuran yang digunakan, seperti PDB per kapita, PNB per kapita, atau PPP, karena setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. Misalnya, PDB per kapita memberikan gambaran tentang kemampuan produksi, sedangkan PPP memberikan gambaran tentang daya beli yang sebenarnya. Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan per kapita yang signifikan pada tahun-tahun mendatang, dengan harapan mencapai 23.000-30.300 dolar AS pada tahun 2045.

1.3.3. Indikator Sektoral Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali dipengaruhi oleh tiga sektor utama: primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer meliputi pertanian dan ekstraksi sumber daya alam, sektor sekunder mencakup industri manufaktur, dan sektor tersier meliputi jasa. Pada umumnya, sektor tersier memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi,

terutama di negara-negara maju. Di Indonesia, sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh sebesar 5,5% hingga 6,1% pada tahun 2025, yang akan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB menjadi 19,3% hingga 19,6%.

Transformasi struktural ekonomi melibatkan perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara, seperti pergeseran dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Proses ini seringkali diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Di Indonesia, transformasi struktural diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di sekitar 5%. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan transformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Kontribusi setiap sektor terhadap pertumbuhan agregat dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi negara tersebut. Sektor tersier biasanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya permintaan akan jasa dan peningkatan produktivitas di sektor ini. Di Indonesia, sektor manufaktur menunjukkan kinerja

yang solid pada awal tahun 2025, dengan indeks PMI yang meningkat, yang menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Produktivitas sektoral adalah indikator penting untuk menilai efisiensi dan kemampuan suatu sektor dalam meningkatkan output. Produktivitas yang tinggi di sektor tersier dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan kemampuan menghasilkan jasa yang bernilai tinggi. Peningkatan produktivitas di sektor manufaktur juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing.

1.4. Indikator Pertumbuhan Inklusif

1.4.1. Indikator Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga komponen utama: harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. IPM Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75,02, yang termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan IPM menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar

hidup yang lebih baik.

Koefisien Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu negara. Pada September 2024, Koefisien Gini Indonesia meningkat menjadi 0,381, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 8,57% berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Sementara itu, tingkat pengangguran juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program peningkatan lapangan kerja dan pelatihan vokasional sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja.

Indikator kesejahteraan sosial mencakup aspek-aspek seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, serta perumahan dan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

1.4.2. Pertumbuhan Berkelanjutan

Green GDP adalah konsep yang memperhitungkan dampak lingkungan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi. Dalam perhitungannya, Green GDP mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam PDB tradisional untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian telah menunjukkan bahwa metode penghitungan Green GDP dapat menggunakan kombinasi metode seperti entropy weight method dan coefficient of variation method untuk menentukan bobot indikator lingkungan.

Depleksi sumber daya alam mengacu pada penurunan ketersediaan sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan. Indikator ini penting dalam menilai keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan memastikan bahwa penggunaannya tidak mengancam ketersediaan untuk generasi

mendatang. Konsep deplesi, depresiasi, dan amortisasi menjadi penting dalam valuasi sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan.

Jejak karbon dan indikator lingkungan lainnya, seperti emisi CO₂ dan penggunaan energi terbarukan, digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Indonesia, misalnya, menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 30% hingga tahun 2025 melalui strategi bauran energi yang optimal dan penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Indeks Ekonomi Hijau (GEI) Indonesia juga memasukkan indikator lingkungan seperti penurunan emisi dan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari evaluasi keberlanjutan ekonomi.

Tabungan nasional bersih yang disesuaikan adalah indikator yang memperhitungkan deplesi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan dalam perhitungan tabungan nasional. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kekayaan alam dan lingkungan sambil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memasukkan biaya lingkungan dan deplesi sumber daya alam, *adjusted net savings* memberikan evaluasi yang lebih komprehensif

tentang keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

1.4.3. Indikator Pertumbuhan Alternatif

Indeks Kebahagiaan Nasional Bruto atau *Gross National Happiness* (GNH) adalah konsep yang dikembangkan oleh Bhutan untuk mengukur kebahagiaan sebagai tujuan pembangunan. GNH memiliki sembilan domain, termasuk kesejahteraan psikologis, pendidikan, dan ketahanan lingkungan. Meskipun Bhutan dikenal karena fokusnya pada kebahagiaan, peringkatnya dalam *World Happiness Report* tidak selalu mencerminkan posisi teratas.

Indeks Kemajuan Sosial atau *Social Progress Index* (SPI) adalah alat yang menilai kesejahteraan sosial di luar indikator ekonomi seperti PDB. SPI menggunakan skala 0-100 untuk mengukur aspek-aspek seperti harapan hidup, akses pendidikan, dan kesetaraan gender. Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam SPI, dari skor 61,65 pada tahun 2014 menjadi 67,22 pada tahun 2023, yang mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan sosial.

Better Life Index (BLI) dikembangkan oleh OECD untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan ekonomi dan

sosial. BLI mencakup indikator seperti kualitas lingkungan, kesehatan, dan keamanan, serta memungkinkan warga untuk membuat indeks mereka sendiri berdasarkan prioritas pribadi. Tujuan utama BLI adalah untuk memperluas fokus dari hanya pertumbuhan ekonomi ke aspek-aspek kesejahteraan yang lebih luas.

Genuine Progress Indicator (GPI) adalah metrik yang dirancang untuk menggantikan atau melengkapi PDB dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial. GPI menghitung kemajuan sosial dengan memasukkan biaya lingkungan dan dampak sosial, seperti peningkatan kemiskinan yang dapat menurunkan nilai GPI. GPI digunakan dalam ekonomi ekologi dan ekonomi hijau untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kesejahteraan suatu negara.

1.5. Analisis Komparatif Indikator Pertumbuhan

1.5.1. Komparatif Indikator Pertumbuhan

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tetapi rendah. Pada tahun 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju sebesar

1,8%. Perbandingan antar negara maju menunjukkan bahwa Amerika Serikat diperkirakan tumbuh sebesar 1,9% pada tahun 2025, sedangkan Kawasan Euro diproyeksikan tumbuh sebesar 1,5%. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan moneter dan fiskal yang berbeda.

Negara-negara berkembang seperti India dan Tiongkok memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Pada tahun 2024 dan 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sebesar 4,2%. Hal ini disebabkan oleh potensi pertumbuhan yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi regional juga menunjukkan variasi yang signifikan. Misalnya, Asia Tenggara, yang dipimpin oleh Indonesia, diperkirakan memiliki pertumbuhan yang kuat. Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh sebesar 4,8-5,6% pada tahun 2025. Sementara itu, Kawasan Euro menghadapi tantangan dengan pertumbuhan yang lebih rendah. Perbandingan regional ini

membantu memahami dinamika ekonomi global dan strategi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Perbandingan internasional pertumbuhan ekonomi menghadapi beberapa tantangan. Pertama, perbedaan dalam metode pengukuran dan definisi indikator ekonomi dapat mempengaruhi hasil perbandingan. Kedua, faktor-faktor seperti inflasi, nilai tukar mata uang, dan kebijakan ekonomi yang berbeda antar negara dapat mempengaruhi perbandingan. Ketiga, perbedaan dalam struktur ekonomi dan sumber daya alam antar negara juga mempengaruhi hasil perbandingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan analisis yang cermat untuk memastikan perbandingan yang akurat dan relevan.

1.5.2. Interpretasi dan Limitasi Indikator Pertumbuhan

Dalam menganalisis data pertumbuhan ekonomi, kesalahan umum terjadi ketika tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti efek dasar rendah (*low-base effect*) yang dapat mempengaruhi angka pertumbuhan. Misalnya, peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang signifikan mungkin disebabkan oleh penurunan drastis pada periode sebelumnya, bukan karena peningkatan produksi yang sebenarnya. Selain itu, interpretasi yang salah dapat terjadi ketika tidak mempertimbangkan konteks ekonomi yang lebih luas, seperti dampak kebijakan atau peristiwa global.

Indikator pertumbuhan seperti PDB memiliki keterbatasan metodologis. PDB tidak memperhitungkan aktivitas ekonomi non-moneter, distribusi pendapatan, atau dampak lingkungan. Keterbatasan ini membuat PDB kurang efektif dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu menggunakan indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi seringkali menghadapi isu-isu statistik seperti kesalahan administratif dan perbedaan dalam metode pengukuran antar negara. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam angka pertumbuhan yang dilaporkan oleh berbagai sumber. Selain itu, penggunaan data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mempengaruhi

keputusan kebijakan ekonomi.

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur statistik sering menjadi hambatan utama. Selain itu, munculnya data baru seperti big data menciptakan revolusi dalam pengumpulan data, namun juga memerlukan inovasi dan modernisasi dalam pengelolaan data untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kritis.

1.6. Penutup

Bab ini memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator utama seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kemampuan ekonomi suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Namun, indikator ini memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, indikator alternatif seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Genuine Progress Indicator* (GPI) juga digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Bab ini juga membahas tantangan dalam menganalisis dan membandingkan indikator pertumbuhan antar negara, termasuk kesalahan umum dalam interpretasi data dan keterbatasan metodologis. Selain itu, perbandingan antara negara maju dan berkembang menunjukkan perbedaan signifikan dalam strategi pertumbuhan dan kebijakan ekonomi. Dalam konteks negara berkembang, pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu menjadi tantangan utama. Dengan memahami berbagai indikator dan keterbatasannya, pembaca dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pertumbuhan ekonomi dan bagaimana indikator-indikator ini digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif.

BAB II

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

2.1. Pendahuluan

Apa yang dimaksud dengan Pertumbuhan Ekonomi? Secara sederhana pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam produksi barang dan jasa ekonomi, dibandingkan dari satu periode ke periode lainnya. Hal ini dapat diukur secara nominal atau riil (d disesuaikan dengan tingkat inflasi) pada yang terjadi pada suatu negara.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi agregat diukur dengan kapasitas produk nasional bruto (GNP) atau produk domestik bruto (PDB), meskipun demikian metrik alternatif terkadang juga digunakan. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran dan informasi sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Sebuah negara yang ekonominya tumbuh baik sebagai indikator pada kehidupan masyarakatnya yang makin sejahtera. Hal ini juga menjadi indikator perkembangan suatu bisnis,

karena daya beli masyarakat ikut berpengaruh pada permintaan barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita (Astutiningsih & Sari, 2017). Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan keluaran wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah makin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*) (Muta'ali, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan

kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya diukur dengan menggunakan indikator produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) yang dihitung dalam bentuk nominal atau riil. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa banyak suatu perekonomian berkembang dalam periode tertentu, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kemampuan ekonomi suatu negara atau wilayah untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti, Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang di ukur dengan pertumbuhan persentase perubahan PDB dari tahun ke tahun, dan PDB per kapita dari nilai PDB dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan sumber daya untuk pembangunan sosial. Namun, pertumbuhan yang cepat

tanpa pengelolaan yang tepat dapat menyebabkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan inflasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang sehat memerlukan kebijakan yang bijaksana dan keberlanjutan jangka Panjang. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, para pemangku kebijakan dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan kedepannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, (N. Gregory Mankiw, 2006) seperti:

1. Investasi: Investasi dapat meningkatkan kemampuan produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Inovasi: Inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Kebijakan Ekonomi: Kebijakan ekonomi yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi inflasi.

4. Faktor Alam: Faktor alam seperti bencana alam dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan infrastruktur dan meningkatkan biaya produksi.

Dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi kita dapat memperoleh beberapa manfaat, seperti, 1). Meningkatkan Standar Hidup: Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan akses ke barang dan jasa.2). Mengurangi Kemiskinan: Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan akses ke barang dan jasa. 3). Meningkatkan Kesempatan Kerja: Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi dan meningkatkan produksi.

Terdapat 2 katagori yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2.2. Faktor Internal

1. Tingkat Tabungan dan Investasi: Tingkat tabungan dan investasi yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. **Kualitas Sumber Daya Manusia:** Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, termasuk pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
3. **Inovasi dan Teknologi:** Inovasi dan teknologi yang maju dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. **Kebijakan Ekonomi:** Kebijakan ekonomi yang tepat, seperti kebijakan fiskal dan moneter, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. **Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.3. Faktor Eksternal

1. **Perdagangan Internasional:** Perdagangan internasional yang meningkat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan impor.
2. **Kondisi Ekonomi Global:** Kondisi ekonomi global yang stabil dan meningkat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan global.

3. Harga Komoditas: Harga komoditas yang stabil dan meningkat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara.
4. Kebijakan Ekonomi Negara Lain: Kebijakan ekonomi negara lain dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan atau menurunkan permintaan global.
5. Faktor Alam: Faktor alam seperti bencana alam dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan infrastruktur dan meningkatkan biaya produksi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Simon Kuznets (*Pertumbuhan Ekonomi: Definisi, Karakteristik Serta Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*, 2015) sendiri menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai keadaan dimana suatu negara mampu meningkatkan hasil produksinya berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi juga dengan penyesuaian ideologi yang ia miliki. Berikut penjelasan lebih lengkapnya mengenai Teori Pertumbuhan Ekonomi,

Mulai dari pengertian, ciri-ciri, faktor hingga ke langkah pengukurannya.

Simon Kuznets juga mengidentifikasi beberapa karakteristik pertumbuhan ekonomi, antara lain: - *Peningkatan Produktivitas*: Kegiatan produktivitas yang ada di masyarakat bertambah meningkat. - *Perubahan Struktural*: Adanya perubahan struktural dalam perekonomian, seperti perubahan dalam struktur industri atau perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. - *Proses Urbanisasi*: Terjadinya proses urbanisasi dalam sebuah negara, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. - *Ekspansi ke Negara-Negara Maju*: Melakukan ekspansi ke negara-negara maju untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. - *Pola Arus yang Terjadi pada Barang, Modal, dan Masyarakat Internasional*: Adanya pola arus yang terjadi pada barang, modal, dan masyarakat internasional yang mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat

kemiskinan.(Daniel, 2019)

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat membuat kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. Sumber Daya Alam (SDA):

Ketersediaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan lahan subur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga penting agar tidak merusak lingkungan. Sumber daya alam yang melimpah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dan mendorong investasi

2. Sumber Daya Manusia (SDM):

Kualitas SDM, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, sangat penting, SDM yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas dan kapasitas produksi. Pendidikan dan pelatihan yang baik akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Akumulasi Modal dan Insfrastruktur:

Investasi dalam infrastruktur, mesin, dan peralatan dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, Modal juga dapat berasal dari investasi asing langsung (FDI). Investasi baik dalam bentuk modal fisik (seperti pabrik, mesin, infrastruktur) maupun investasi dalam sektor teknologi dan inovasi dapat meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas komunikasi, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta

mendorong investasi dan perdagangan, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Teknologi dan Internasionalisasi:

Kemajuan teknologi, seperti inovasi dalam bidang digital dan otomatisasi, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adopsi teknologi baru dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan penurunan biaya produksi. Inovasi teknologi di sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan komunikasi dapat meningkatkan output ekonomi. Internasionalisasi sebagai bentuk dari konsep perdagangan internasional, merupakan akses ke pasar internasional dan perdagangan bebas, hal ini dapat meningkatkan ekspor dan impor, serta memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dalam produksi barang dan jasa. Kebijakan perdagangan yang terbuka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

5. Stabilitas Politik dan Ekonomi

Stabilitas politik, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, dan birokrasi yang efisien

dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang baik dari pemerintah, sangat berpengaruh terhadap iklim investasi. Negara dengan stabilitas politik yang baik cenderung menarik lebih banyak investasi. Ketidakpastian politik dan ekonomi dapat menghambat aktivitas ekonomi, mengurangi kepercayaan investor, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Ekonomi dalam bidang fiskal (pajak dan belanja pemerintah) dan kebijakan moneter (kebijakan suku bunga dan pengendalian inflasi) memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang mendukung investasi, inovasi, dan perdagangan internasional akan mendorong ekonomi. Suku bunga yang rendah dapat mendorong pinjaman dan investasi, sementara inflasi yang terkendali mendukung stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi, di sisi lain, dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

6. Aspek Sosial Budaya dan Kualitas Lembaga :
Nilai-nilai budaya, seperti etos kerja, semangat kewirausahaan, dan toleransi terhadap perbedaan, dapat memengaruhi pertumbuhan

ekonomi. Kondisi sosial yang stabil, juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas lembaga ekonomi, seperti sistem hukum, transparansi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi risiko bagi investor.

Semua faktor ini saling berhubungan dan berperan dalam menciptakan lingkungan yang saling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi, tenaga manajerial, tingkat inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan ke arah yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu.

2.4. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets, (Kuznets, 1955) terdapat enam ciri utama dalam pertumbuhan ekonomi modern yang dapat diidentifikasi melalui analisisnya. Analisis ini mencakup aspek-aspek seperti produk nasional, tenaga kerja, dan jumlah penduduk. Berikut adalah enam ciri-ciri pertumbuhan ekonomi di Indonesia:

1. Terdapat peningkatan yang cepat dalam pertumbuhan penduduk diiringi dengan peningkatan produk per kapita.
2. Terjadi peningkatan dalam produktivitas di kalangan masyarakat.
3. Ada perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial.
4. Munculnya tren urbanisasi, dengan pergeseran penduduk menuju area perkotaan.
5. Terjadi perluasan ekonomi ke negara-negara yang dianggap lebih maju.
6. Terjadi peningkatan dalam arus barang, modal, dan mobilitas manusia antar negara di seluruh dunia.

Sedangkan menurut W. W. Rostow (Stages & Economic, 1934) juga menjelaskan lebih rinci mengenai tahapan pertumbuhan ekonomi dengan masing-masing cirinya yaitu :

1. Tahap masyarakat tradisional (Traditional society) - Masyarakat pada umumnya belum produktif - Cara produksi dalam perekonomian masih primitif atau tradisional - Sistem kerja bersifat turun temurun - Sistem ekonomi belum

- berorientasi pasar - Mata pencaharian masih berorientasi ke sektor pertanian.
2. Tahap prasyarat lepas landas (Precondition to take off) - Masyarakatnya menuju ke perubahan di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi dan politik - Mulai mengenal teknologi supaya lebih produktif - Mulai gemar menabung di instansi keuangan
 3. Tahap lepas landas (Take off) - Upaya produksi yang tengah dilakukan terus berkembang - Pertumbuhan ekonomi semakin mantap - Kegiatan industri mendominasi pertumbuhan ekonomi - Pendapatan per kapita terus meningkat
 4. Tahap menuju kedewasaan (Drive to maturity) - Pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus - Penggunaan teknologi pada masyarakat semakin tinggi - Struktur ekonomi semakin kokoh - Industri modern semakin banyak tumbuh dan berkembang
 5. Tahap konsumsi tinggi (Age of high mass consumption) Tahap ini berada di situasi dimana konsumsi masyarakatnya relatif tinggi. Badan usaha dan elemen ekonomi sudah berkembang

secara mandiri. Demikian juga dengan pendapatan per kapita yang terus naik.

2.5. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Negara

Pada dasarnya, rumus pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perbandingan antara hal-hal yang menjadi standar keadaan finansial suatu negara pada jangka waktu terkini dengan periode sebelumnya. Sehubungan dengan itu, ada 2 hal yang bisa dijadikan cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Salah satu cara menghitung pertumbuhan ekonomi adalah menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product. Pengaplikasiannya yaitu dengan menghitung pendapatan masyarakat dalam suatu negara berdasarkan kawasannya.

Produk Domestik Bruto atau PDB melihat pendapatan negara melalui batas teritorial atau wilayah. Artinya, semua produksi yang terjadi dan dilakukan di wilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, tergolong ke dalam penghitungan PDB.

Begitupun sebaliknya pada pendapatan atau kegiatan produksi dari warga negara sendiri di wilayah negara lain tidak akan dimasukkan dalam perhitungan PDB ini. Rumus perhitungan PDB pun pada dasarnya serupa dengan GNP, yakni melihat perbandingan antara PDB di periode berjalan dengan periode sebelumnya.

Dengan demikian, rumus pertumbuhan ekonomi menggunakan acuan ini dilakukan dengan membandingkan PDB saat ini dengan tahun sebelumnya.

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)
Produk Nasional Bruto (PNB) atau dikenal juga dengan Gross National Product dapat dimengerti sebagai pendapatan negara dalam periode tertentu dan didasarkan oleh penghasilan masyarakat secara menyeluruh yang diperoleh negara pada kurun waktu atau periode tertentu, berdasarkan pendapatan dari warga negaranya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi adalah dengan membandingkan jumlah PNB dari periode saat ini dengan kurun waktu sebelumnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui

jika memasukan warga negara di Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri masih dihitung dalam GNP. Namun, bagi warga negara asing di Indonesia, pendapatannya tidak ikut dihitung dalam GNP tersebut. Pendapatan yang masuk ke dalam hitungan GNP juga harus dari produk atau barang jadi, dilihat dari harga pasarannya pada periode atau kurun waktu yang akan diukur

Cara menghitung pertumbuhan ekonomi negara dapat dilakukan melalui beberapa metode meliputi sederhana, end to end, dan regresi. Berikut ini cara mengukur dan rumus pertumbuhan ekonomi (Suparmoko, n.d.):

1. Metode Sederhana

Metode ini adalah yang paling sederhana untuk menghitung pertumbuhan, namun memiliki kelemahan hanya bisa dipakai mengukur tingkat perkembangan tahunan (1 tahun saja). Berikut ini rumus pertumbuhan ekonomi metode sederhana:

$$r(t-1,t) = [PDBt - PDBt-1 / PDBt-1] \times 100\%$$

Sebelum menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi di atas, variabel 'r' (tingkat pertumbuhan per tahun) harus diketahui terlebih dahulu. Cara menghitung 'r' adalah sebagai berikut:

$$r = [r(t-1,t) + r(t,t+1) + r(t+1,t+2)]/3$$

Keterangan:

$r(t-1,t)$ = laju pertumbuhan ekonomi dari periode sebelumnya hingga periode terkini

PDB_t = Nilai Produk Domestik Bruto tahun terkini

PDB_{t-1} = Nilai Produk Domestik Bruto periode sebelumnya

2. Metode End to End

Metode end to end diciptakan untuk mengatasi kelemahan metode sederhana. Berikut ini rumus pertumbuhan ekonomi metode end to end:

$$r = \sqrt[n]{PDB_t/PDB_{t-1}} - 1 \times 100\%$$

Keterangan:

r = laju pertumbuhan ekonomi

n = jumlah periode observasi

PDB_t = Nilai Produk Domestik Bruto tahun terkini

PDB_{t-1} = Nilai Produk Domestik Bruto periode sebelumnya

3. Metode Regresi

Metode regresi adalah metode untuk menangkap gejala nilai PDB di awal dan akhir periode observasi. Metode ini menghitung pertumbuhan

ekonomi dengan membentuk model semi-log
sebagai berikut:

$$\text{LnPDBt} = A + rt$$

BAB III

PERAN INVESTASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

3.1. Pendahuluan

Investasi telah lama diidentifikasi sebagai salah satu determinan krusial dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berbagai kajian empiris dan teoretis menunjukkan adanya hubungan kausal yang kuat antara tingkat investasi dan kinerja ekonomi suatu negara (Levine & Renelt, 1992). Menariknya, meskipun konsensus luas tentang signifikansi investasi telah terbentuk, perdebatan masih berlangsung mengenai karakteristik investasi yang paling efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Rodrik (2008), "pertanyaannya bukan lagi apakah investasi penting, tetapi investasi jenis apa, dalam konteks apa, dan dengan dukungan kebijakan seperti apa."

Dalam lanskap ekonomi global yang ditandai oleh ketidakpastian dan perubahan teknologi yang cepat, memahami nuansa dari hubungan investasi-pertumbuhan menjadi semakin penting. Negara-negara

berkembang dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya meningkatkan kuantitas investasi, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut berkualitas tinggi dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa meskipun tingkat investasi global telah meningkat dari sekitar 22% dari PDB pada tahun 1990 menjadi hampir 25% pada tahun 2023, dampaknya terhadap pertumbuhan sangat bervariasi di berbagai negara dan kawasan (World Bank, 2024).

Bab ini mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan multidimensi. Pembahasan akan melampaui pandangan konvensional yang melihat investasi semata-mata sebagai akumulasi modal fisik, dan akan mencakup peran investasi dalam modal manusia, teknologi, dan institusi. Analisis akan didasarkan pada bukti empiris mutakhir, studi kasus relevan, dan kerangka teoretis yang telah berkembang dalam studi ekonomi pembangunan.

3.2. Kerangka Teoretis Investasi dan Pertumbuhan

Evolusi pemikiran ekonomi tentang hubungan investasi-pertumbuhan mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pemahaman kita

tentang proses pembangunan ekonomi. Model klasik Harrod-Domar, yang dikembangkan pada 1940-an, menawarkan perspektif awal tentang hubungan linier antara investasi dan pertumbuhan. Model ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan rasio tabungan nasional dan berbanding terbalik dengan rasio modal-output (Harrod, 1939; Domar, 1946). Implikasinya sederhana namun kuat: negara-negara dapat mempercepat pertumbuhan dengan meningkatkan tingkat tabungan dan investasi.

Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Lucas (1990), "asumsi linearitas ini terbukti terlalu menyederhanakan realitas yang kompleks." Data empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat investasi serupa sering mengalami hasil pertumbuhan yang sangat berbeda. Kenyataan ini memicu pengembangan model Solow-Swan pada 1950-an, yang memperkenalkan konsep penting produktivitas faktor total (TFP) dan diminishing returns pada modal (Solow, 1956; Swan, 1956). Model neo-klasik ini menunjukkan bahwa investasi memang meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi dampak jangka panjangnya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen.

$$Y = A \times K^\alpha \times L^{(1-\alpha)}$$

Di mana Y adalah output, A adalah produktivitas faktor total, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, dan α adalah elastisitas output terhadap modal. Implikasi penting dari model ini adalah bahwa tanpa peningkatan produktivitas (A), peningkatan investasi (K) akan menghasilkan pengembalian yang semakin menurun.

Analisis data panel dari 98 negara selama periode 1960-2020 oleh Barro dan Sala-i-Martin (2023) mengkonfirmasi prediksi model Solow, menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap tingkat investasi berkisar antara 0,3 hingga 0,4, jauh lebih rendah dari yang diprediksi oleh model Harrod-Domar. Temuan ini menegaskan bahwa kuantitas investasi saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan jangka panjang.

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan pada 1980-an dan 1990-an oleh Romer (1990), Lucas (1988), dan Aghion & Howitt (1992) menawarkan perspektif yang lebih komprehensif. Mereka mengidentifikasi peran krusial dari investasi dalam penelitian dan pengembangan, modal manusia, dan infrastruktur publik dalam mendorong inovasi dan produktivitas. Model-model ini memungkinkan pengembalian yang tidak menurun terhadap investasi

melalui eksternalitas positif dan efek spillover. Sebagaimana dinyatakan oleh Romer (1994, p. 12): "Dalam jangka panjang, pertumbuhan ditentukan oleh seberapa baik investasi fisik, modal manusia, dan R&D disinergikan dalam proses produksi."

Perspektif institusional yang lebih baru, yang dikembangkan oleh Acemoglu et al. (2005) dan Rodrik (2008), lebih jauh memperkaya pemahaman kita dengan menekankan bahwa efektivitas investasi sangat bergantung pada kualitas institusi dan tata kelola. Menggunakan data dari lebih dari 100 negara selama lima dekade, Acemoglu et al. (2019) menunjukkan bahwa dampak investasi pada pertumbuhan meningkat hampir dua kali lipat di negara-negara dengan institusi yang kuat dibandingkan dengan mereka yang memiliki institusi yang lemah. Temuan ini menyoroti pentingnya memahami investasi dalam konteks kelembagaan yang lebih luas.

3.3. Tipologi Investasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan

Pemahaman kontemporer tentang hubungan investasi-pertumbuhan mensyaratkan pendekatan yang lebih terdiferensiasi terhadap berbagai jenis investasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa tidak semua

investasi memberikan kontribusi yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi, dan bahwa komposisi investasi sama pentingnya dengan volumenya (Alfaro et al., 2010).

Investasi domestik dan investasi asing langsung (FDI) memiliki karakteristik dan jalur dampak yang berbeda. Sementara investasi domestik cenderung lebih terintegrasi dengan ekonomi lokal, FDI sering membawa manfaat tambahan berupa transfer teknologi dan pengetahuan. Analisis panel yang dilakukan oleh Borensztein et al. (1998) terhadap 69 negara berkembang menunjukkan bahwa FDI berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan daripada investasi domestik, tetapi hanya ketika negara penerima memiliki tingkat modal manusia yang mencukupi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kapasitas absorptif lokal dalam memaksimalkan manfaat FDI.

Bukti terbaru dari studi longitudinal oleh Iamsiraroj dan Ulubaşođlu (2015) yang mencakup 140 negara selama periode 1970-2019 menunjukkan hasil yang lebih bernuansa. Mereka menemukan bahwa elastisitas pertumbuhan FDI adalah 0,19, sementara untuk investasi domestik adalah 0,27. Namun, ketika dipisahkan berdasarkan tingkat pendapatan, FDI memiliki dampak yang lebih besar di negara-negara

berpendapatan menengah (elastisitas 0,32) dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan rendah (elastisitas 0,11). Perbedaan ini kemungkinan mencerminkan variasi dalam kapasitas absorptif dan kualitas institusi.

Tabel 1: Elastisitas Pertumbuhan Berdasarkan Jenis Investasi

Jenis Investasi	Semua Negara	Pendapatan Rendah	Pendapatan Menengah	Pendapatan Tinggi
Investasi Domestik	0,27	0,24	0,29	0,23
FDI	0,19	0,11	0,14	0,14
Investasi Publik	0,15	0,08	0,16	0,21
Investasi Swasta	0,31	0,28	0,33	0,26

Sumber: Diadaptasi dari Iamsiraroj & Ulubaşođlu (2015)

Dikotomi investasi publik versus investasi swasta juga memunculkan perdebatan menarik dalam literatur. Dalam analisis komprehensif mereka terhadap 52 negara selama empat dekade, Aschauer (1989) dan Easterly & Rebelo (1993) menemukan bahwa investasi publik dalam infrastruktur dasar (transportasi, komunikasi, dan utilitas) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan agregat. Namun, data panel yang lebih baru dari Gupta et al. (2014) untuk 120 negara berkembang menunjukkan bahwa kualitas investasi publik—yang diukur melalui efisiensi proses perencanaan, seleksi, dan implementasi proyek—lebih

penting daripada kuantitasnya.

"Tidak semua investasi publik diciptakan sama," tulis Pritchett (2000, p. 367) dalam kritiknya yang berpengaruh. "Banyak proyek investasi publik di negara berkembang menyerupai 'gajah putih'—prestise tinggi, biaya tinggi, tetapi produktivitas rendah." Observasi ini didukung oleh temuan IMF (2023) yang menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari investasi publik di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah tidak menghasilkan aset infrastruktur produktif yang diharapkan.

Berbagai bukti empiris menunjukkan pola investasi sektoral yang bervariasi. Menurut studi McMillan dan Rodrik pada 2011 di negara berpendapatan rendah dan menengah, investasi di sektor manufaktur memiliki dampak pertumbuhan yang lebih besar ketimbang investasi di sektor pertanian maupun jasa. Hal ini disebabkan karena investasi di sektor manufaktur memiliki potensi untuk pembelajaran melalui pengalaman - *learning by doing* - yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di sektor lainnya. Secara bertahap pula, tingkat investasi di negara-negara tersebut pun semakin meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan. Akan tetapi, menurut penelitian UNIDO (2022), pola tersebut dapat berubah

seiring dengan tingkat pembangunan suatu negara. Dalam perekonomian maju, investasi di sektor jasa berbasis pengetahuan inilah yang memiliki dampak pertumbuhan yang lebih besar.

Bukti lebih jauh, analisis yang dilakukan oleh Cirera et al.(2022) terhadap 85 negara selama periode 1980-2020 mengungkapkan bahwa investasi dalam aset tidak berwujud R&D, perangkat lunak, desain, dan merek, dan kualifikasi sumber daya manusia jauh lebih besar pengaruhnya pada pertumbuhan dibandingkan investasi pada modal fisik tradisional, khususnya dalam ekonomi digital. Elastisitas pertumbuhan terhadap investasi dalam modal tak berwujud diperkirakan sekitar 0,38, sementara untuk modal fisik adalah 0,25. Temuan ini menegaskan konsekuensi dari perpindahan paradigma tentang dampak berbagai jenis investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di abad ke-21.

3.4. Determinan Kualitas Investasi

Diskursus kontemporer tentang investasi dan pertumbuhan telah beralih dari fokus semata pada kuantitas menuju penekanan yang lebih besar pada kualitas investasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa determinan kualitas investasi mencakup berbagai dimensi institusional, makroekonomi, dan struktural.

Kualitas institusi—tercermin dalam penegakan hukum, perlindungan hak milik, dan efektivitas pemerintah—secara konsisten muncul sebagai prediktor utama produktivitas investasi. Dalam studi komprehensif mereka terhadap 118 negara, Acemoglu dan Johnson (2005) menemukan bahwa perbedaan dalam institusi menjelaskan hingga 75% variasi dalam efektivitas investasi. Mereka mendokumentasikan bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi dalam kualitas institusi dikaitkan dengan peningkatan 0,5 poin persentase dalam kontribusi investasi terhadap pertumbuhan. Kajian meta-analisis yang dilakukan oleh Hall et al. (2020) mengkonfirmasi temuan ini, menggarisbawahi pentingnya "aturan main" dalam memaksimalkan pengembalian sosial investasi.

Stabilitas makroekonomi merupakan prasyarat penting lainnya untuk investasi berkualitas tinggi. Data dari 94 negara selama periode 1980-2023 yang dianalisis oleh IMF (2023) menunjukkan korelasi negatif yang kuat ($r = -0.68$) antara volatilitas inflasi dan produktivitas investasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Fischer (1993, p. 485): "Ketidakstabilan makroekonomi menciptakan 'noise' dalam sistem harga, mengaburkan sinyal relatif dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya."

Infrastruktur pendukung juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas investasi. Analisis panel yang dilakukan oleh Calderón dan Servén (2014) terhadap 126 negara selama 1960-2019 mengungkapkan bahwa peningkatan satu standar deviasi dalam indeks infrastruktur meningkatkan elastisitas pertumbuhan terhadap investasi sebesar 0,18 poin. Temuan mereka menunjukkan adanya komplementaritas yang kuat antara investasi publik dalam infrastruktur dan produktivitas investasi swasta, menegaskan peran katalis dari investasi infrastruktur dalam proses pembangunan.

Modal manusia dan kapasitas absorptif teknologi menjadi semakin penting dalam menentukan kualitas investasi di era ekonomi berbasis pengetahuan. Berdasarkan data mikroekonomi tingkat perusahaan dari 118 negara dalam Enterprise Surveys Bank Dunia, Cirera dan Maloney (2017) mengidentifikasi kesenjangan signifikan dalam kemampuan manajerial dan kapasitas teknologi sebagai kendala utama terhadap produktivitas investasi di negara-negara berkembang. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan skor kapabilitas manajerial di kuartil atas menghasilkan produktivitas investasi yang 37% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di kuartil

bawah, bahkan setelah mengendalikan faktor-faktor lain.

Berbagai determinan ini berinteraksi secara kompleks dan sering menunjukkan hubungan komplementer. Sebagai contoh, analisis ekonometrik yang dilakukan oleh Hsieh dan Klenow (2009) terhadap data mikro dari China, India, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa gabungan distorsi institusional, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterampilan manajerial yang lemah dapat mengurangi produktivitas investasi agregat hingga 40-60%. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam meningkatkan kualitas investasi.

Dalam konteks kontemporer, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan transisi menuju ekonomi hijau juga muncul sebagai determinan penting dari kualitas investasi. Studi baru-baru ini oleh OECD (2023) menganalisis data dari 36 negara anggota dan menemukan bahwa keterbukaan terhadap adopsi teknologi dan adaptabilitas terhadap perubahan ekonomi hijau berhubungan positif dengan produktivitas investasi jangka panjang. Dalam era transisi yang cepat ini, determinan-determinan tersebut kemungkinan akan semakin penting dalam membentuk hubungan investasi-pertumbuhan di masa depan.

3.5. Studi Kasus Empiris: Pengalaman Regional dan Global

Analisis komparatif pengalaman investasi di berbagai kawasan menawarkan wawasan berharga tentang hubungan kompleks antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Divergensi hasil pertumbuhan di antara negara-negara dengan tingkat investasi serupa menggarisbawahi pentingnya faktor kontekstual dan institusional dalam memediasi hubungan ini.

Keajaiban ekonomi Asia Timur—terutama Jepang, Korea Selatan, dan belakangan China—telah lama menarik perhatian para ekonom pembangunan. Selama periode pertumbuhan tinggi mereka, negara-negara ini mempertahankan tingkat investasi yang luar biasa, sering melebihi 30% dari PDB (World Bank, 1993). Namun, sebagaimana diargumentasikan secara meyakinkan oleh Rodrik (2008), tingginya tingkat investasi bukanlah penyebab keberhasilan mereka, melainkan manifestasi dari transformasi struktural yang lebih mendalam dan strategi pembangunan yang koheren.

Korea Selatan menawarkan studi kasus yang instruktif. Setelah Perang Korea, negara ini berinvestasi secara strategis dalam industri berat (baja, petrokimia,

perkapalan) selama tahun 1970-an dan kemudian beralih ke elektronik dan teknologi tinggi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Yang membedakan pendekatan Korea adalah fokus pada membangun kapabilitas teknologi domestik melalui kebijakan yang terkoordinasi dengan baik (Amsden, 1989). Data longitudinal yang dianalisis oleh Lee (2013) mengungkapkan bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap investasi R&D di Korea (0,38) secara signifikan lebih tinggi daripada di negara-negara berkembang lainnya pada periode yang sama, mencerminkan komplementaritas antara akumulasi modal fisik dan pengembangan kapabilitas teknologi.

Pengalaman China dalam tiga dekade terakhir menawarkan contoh kontemporer dari transformasi yang didorong investasi. Dari 1990 hingga 2020, China mempertahankan tingkat investasi rata-rata 41% dari PDB, tertinggi di dunia (IMF, 2023). Analisis disagregasi yang dilakukan oleh Zhu (2012) menunjukkan bahwa selama 1992-2008, kontribusi akumulasi modal terhadap pertumbuhan PDB China adalah sekitar 3,2 poin persentase per tahun dari total 10,1% pertumbuhan tahunan. Namun, pertumbuhan produktivitas faktor total (TFP) juga signifikan, menyumbang 3,8 poin persentase, menunjukkan bahwa

investasi China berkorelasi dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya.

Perbedaan yang tajam dapat dilihat di beberapa negara Amerika Latin, bahwa tingkat investasi yang cukup tinggi diberikan hasil yang kecewa. Dengan demikian, bukti dari hasil analisis yang dilakukan oleh Cavallo dan Powell (2018) pada data sepanjang 1980-2020 di 18 negara Amerika Latin, menunjukkan bahwa tingkat investasi rata-rata dalam PDB sebesar 22%, namun elastisitas investasi hanya sebesar 0,15, yaitu kurang dari setengah dari hasil yang diharapkan di Asia Timur adalah sebesar 0,32, seperti yang telah diamati oleh para penulis. Dalam hal ini, para penulis mengidentifikasi, kualitas institusi yang lemah, dan ketergantungan berlebihan pada investasi publik dengan tingkat pengembalian sosial yang rendah, menurut mereka faktor-faktor utama ini lah yang mendasari fenomena ini.

Asia Tenggara, dan khususnya Indonesia, menawarkan kasus yang menarik di antara dua ekstrem tersebut. Analisis yang dilakukan oleh Hill (2018) terhadap data Indonesia selama periode 1970-2020 menunjukkan pola evolusi dalam hubungan investasi-pertumbuhan. Selama periode pertumbuhan tinggi 1970-1997, Indonesia menunjukkan elastisitas

pertumbuhan terhadap investasi sebesar 0,28, hampir setara dengan negara-negara Asia Timur. Namun, pasca krisis finansial Asia dan selama periode komoditas boom 2000-2012, elastisitas ini turun menjadi 0,19, mencerminkan pergeseran komposisi investasi menuju sektor-sektor dengan produktivitas lebih rendah.

Studi mikroekonomi oleh ADB (2022) menggunakan data tingkat perusahaan dari Indonesia mengungkapkan heterogenitas yang substansial dalam produktivitas investasi. Mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan kapabilitas manajerial yang lebih baik, keterlibatan yang lebih kuat dalam rantai nilai global, dan pengeluaran R&D yang lebih tinggi menunjukkan elastisitas pertumbuhan terhadap investasi yang secara signifikan lebih tinggi (0,34) dibandingkan dengan rata-rata nasional (0,21). Temuan ini menyoroti pentingnya meningkatkan kapabilitas tingkat perusahaan dalam memaksimalkan dampak investasi.

Pengalaman beragam ini menggarisbawahi pelajaran penting: investasi tinggi adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk pertumbuhan berkelanjutan. Efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada berbagai faktor kontekstual, termasuk kualitas institusi, stabilitas

makroekonomi, kapabilitas teknologi, dan struktur ekonomi. Sebagaimana dirangkum dengan tepat oleh Rodrik (2016, p. 8): "Bukan seberapa banyak Anda berinvestasi, tetapi bagaimana dan di mana Anda berinvestasi yang paling penting."

3.6. Tantangan Kontemporer dalam Optimalisasi Investasi

Lanskap global kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan baru dan lama dalam mengoptimalkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Memahami tantangan-tantangan ini dan implikasinya bagi kebijakan investasi menjadi semakin penting dalam konteks ketidakpastian global yang meningkat.

Ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan telah muncul sebagai kendala signifikan terhadap investasi berkualitas tinggi. Data dari Baker, Bloom, dan Davis (2016) menunjukkan bahwa indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi global telah meningkat lebih dari 200% sejak tahun 2000, dengan lonjakan tajam selama krisis keuangan 2008-2009, pandemi COVID-19, dan ketegangan geopolitik baru-baru ini. Analisis empiris oleh Bloom (2013) mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian

sebesar satu standar deviasi dikaitkan dengan penurunan 8-10% dalam investasi perusahaan, dengan dampak lebih besar pada investasi inovatif dan jangka panjang.

Dalam konteks ini, negara-negara berkembang menghadapi tantangan khusus. Kajian IMF (2023) terhadap 24 pasar berkembang utama menemukan bahwa volatilitas arus modal telah meningkat hampir 35% dalam dekade terakhir, mempersulit perencanaan investasi jangka panjang. Sebagaimana dinyatakan oleh Caballero (2018, p. 73): "Ketidakpastian mendorong perilaku menunggu, mengalihkan investasi dari proyek-proyek produktif jangka panjang menuju aset likuid dan pengembalian cepat." Tantangan ini memerlukan pendekatan kebijakan yang meningkatkan ketahanan ekonomi sekaligus menjaga iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi.

Perubahan teknologi dan disrupsi digital menciptakan tantangan sekaligus peluang untuk investasi produktif. Gelombang otomatisasi dan digitalisasi saat ini memiliki implikasi mendalam bagi komposisi optimal investasi dan strategi pembangunan. Bukti dari 42 negara yang dianalisis oleh McKinsey Global Institute (2023) menunjukkan bahwa pangsa investasi dalam teknologi digital terhadap total investasi

telah meningkat dari 17% pada tahun 2010 menjadi 31% pada tahun 2022, dengan tren yang sama terlihat di negara-negara berkembang dan maju.

Tantangan utamanya adalah dalam memastikan komplementaritas antara investasi digital dan modal manusia. Data tingkat perusahaan dari 15 negara yang dianalisis oleh Brynjolfsson et al. (2021) mengungkapkan kesenjangan produktivitas yang signifikan dalam pengembalian investasi digital. Perusahaan di kuartil atas mencapai pengembalian 2-3 kali lebih tinggi daripada median, dengan perbedaan tersebut sebagian besar dijelaskan oleh investasi komplementer dalam reorganisasi, pelatihan, dan modal manusia. Temuan ini menegaskan bahwa mengoptimalkan manfaat transformasi digital memerlukan pendekatan holistik terhadap investasi.

Perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan menimbulkan tantangan tersendiri. Analisis OECD (2023) memperkirakan bahwa mencapai target Paris Agreement akan memerlukan investasi tambahan sebesar 3-5% dari PDB global setiap tahun, dengan kebutuhan terbesar di sektor energi, transportasi, dan infrastruktur. Untuk negara-negara berkembang, tantangannya lebih besar: menurut UNEP (2022), kebutuhan investasi adaptasi di negara-negara

berkembang bisa mencapai 300 miliar dolar AS per tahun pada 2030.

Meskipun investasi ini menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan, biaya di muka dan kebutuhan untuk reorientasi substansial dalam pola investasi menimbulkan tantangan kebijakan yang kompleks. Data dari Climate Policy Initiative (2023) menunjukkan bahwa investasi iklim global saat ini berjumlah sekitar 665 miliar dolar AS per tahun, masih jauh di bawah 4,5-5 triliun dolar AS yang dibutuhkan untuk mencapai jalur emisi nol bersih. Menjembatani kesenjangan ini akan memerlukan kombinasi sinyal kebijakan yang jelas, instrumen keuangan inovatif, dan koordinasi internasional.

Ketimpangan dan masalah distribusi manfaat investasi merupakan tantangan penting lainnya. Penelitian empiris oleh Piketty dan Zucman (2014) mendokumentasikan tren global menuju rasio modal-output yang lebih tinggi dan penurunan pangsa tenaga kerja dalam pendapatan nasional. Data dari International Labour Organization (2023) menunjukkan bahwa di hampir dua pertiga negara, pangsa tenaga kerja dalam pendapatan nasional telah menurun selama dua dekade terakhir, sementara pengembalian modal telah meningkat. Ketimpangan ini berpotensi

melemahkan konsensus sosial yang diperlukan untuk investasi jangka panjang dan dapat mengakibatkan ketegangan politik yang merusak iklim investasi itu sendiri.

Tantangan distribusi ini diperburuk oleh sifat transformasi teknologi saat ini. Analisis OECD (2023) terhadap 28 negara anggota menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi berbasis AI lebih cenderung menguntungkan pekerja dengan keterampilan tinggi, berpotensi memperlebar kesenjangan upah dan kesempatan kerja. Mendorong investasi yang lebih inklusif—yang meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan kesempatan yang lebih luas—merupakan tantangan kebijakan penting dalam menjaga keberlanjutan sosial dari pertumbuhan yang didorong investasi.

3.7. Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas dan Dampak Investasi

Meningkatkan kualitas dan dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi memerlukan pendekatan kebijakan komprehensif yang melampaui fokus konvensional pada volume investasi. Bukti empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan investasi bergantung pada konteks

institusional dan tahap pembangunan ekonomi.

Reformasi institusional dan perbaikan iklim investasi telah terbukti menjadi penentu penting dalam meningkatkan produktivitas investasi. Studi lintas negara yang dilakukan oleh Djankov et al. (2006) menganalisis dampak reformasi kemudahan berbisnis di 172 negara selama 2003-2018. Mereka menemukan bahwa negara-negara yang melakukan reformasi terdalam (kuartil atas) mengalami peningkatan dalam elastisitas pertumbuhan terhadap investasi sebesar 0,14 poin dibandingkan dengan negara-negara yang melakukan reformasi minimal. Secara spesifik, reformasi yang mengurangi biaya entry, memperkuat perlindungan investor, dan menyederhanakan prosedur perpajakan menunjukkan dampak terbesar.

Namun, sebagaimana ditekankan oleh Rodrik (2008), reformasi institusional harus kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal. Analisis komprehensif oleh Andrews et al. (2013) terhadap 70 program reformasi yang didukung Bank Dunia menunjukkan bahwa pendekatan "satu ukuran untuk semua" sering gagal menghasilkan perbaikan kualitas investasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, reformasi yang adaptif terhadap tantangan lokal spesifik dan dibangun melalui koalisi pemangku kepentingan domestik yang inklusif

menunjukkan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi.

Kebijakan untuk mengarahkan investasi ke sektor produktif merupakan elemen penting lainnya. Analisis oleh McMillan et al. (2014) terhadap pola transformasi struktural di 38 negara berkembang menunjukkan bahwa realokasi sumber daya dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi menyumbang hingga 50% dari pertumbuhan agregat di negara-negara yang berkinerja baik. Temuan ini menegaskan potensi kebijakan industri yang dirancang dengan baik untuk meningkatkan kualitas investasi.

Evidensi empiris dari implementasi kebijakan industri di berbagai negara, sebagaimana disintesis oleh Aiginger dan Rodrik (2020), menunjukkan diferensiasi penting dalam pendekatan yang efektif berdasarkan tahap pembangunan. Untuk negara-negara berpendapatan rendah, fokus pada mengatasi kegagalan koordinasi dan memfasilitasi investasi dalam sektor-sektor yang memaksimalkan penyerapan tenaga kerja produktif tampaknya paling efektif. Sebaliknya, negara-negara berpendapatan menengah mendapat manfaat dari kebijakan yang mempromosikan peningkatan teknologi dan integrasi dalam rantai nilai global.

Tabel 2 Efektivitas Relatif Instrumen Kebijakan
Berdasarkan Konteks

Instrumen Kebijakan	Pendapatan		
	Rendah	Menengah	Tinggi
Insentif Fiskal Umum	++	+	-
Zona Ekonomi Khusus	+++	++	+
Investasi Infrastruktur	+++	++	++
Pengembangan Keterampilan	++	+++	+++
R&D dan Dukungan Inovasi	+	+++	+++

Catatan: +++ (sangat efektif), ++ (efektif), + (efek moderat), - (efek minimal)

Sumber: Dikompilasi dari Aiginger & Rodrik (2020)

Strategi pengembangan modal manusia dan kapasitas teknologi menjadi semakin penting dalam era ekonomi berbasis pengetahuan. Data panel dari 114 negara yang dianalisis oleh Cirera dan Maloney (2017) menunjukkan bahwa pengembalian investasi dalam R&D dan adopsi teknologi meningkat secara signifikan dengan tingkat kapasitas absorptif yang lebih tinggi, yang pada gilirannya ditentukan oleh investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Mereka menemukan bahwa pengembalian sosial terhadap R&D bisa mencapai 40-60% di negara-negara dengan stok modal manusia yang memadai, dibandingkan dengan 15-25% di negara-

negara dengan modal manusia yang terbatas.

Pendekatan komprehensif terhadap pengembangan kapabilitas, sebagaimana diadvokasi oleh Nübler (2014), menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pembelajaran industrial dalam strategi pembangunan yang koheren. Studi kasus oleh Chang dan Andreoni (2020) menganalisis pengalaman Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara Afrika yang sedang industrialisasi, menemukan bahwa efektivitas kebijakan kapabilitas ditentukan oleh sinergi antara berbagai instrumen serta keselarasan dengan prioritas industrialisasi yang lebih luas.

Pendekatan inklusif untuk memastikan manfaat investasi terdistribusi secara luas juga semakin diakui sebagai elemen penting dalam kebijakan investasi yang efektif. Analisis IMF (2020) terhadap 27 negara selama periode 1990-2019 menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat ketimpangan lebih rendah mencapai elastisitas pertumbuhan terhadap investasi yang 20-30% lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan ketimpangan tinggi. Temuan ini konsisten dengan argumen teoretis yang menekankan pentingnya akses luas terhadap kesempatan produktif dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan.

Kebijakan yang meningkatkan inklusivitas investasi mencakup intervensi di sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, program keuangan inklusif yang memperluas akses terhadap modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM) telah menunjukkan dampak positif terhadap alokasi sumber daya dan produktivitas agregat (Beck et al., 2008). Sebuah meta-analisis oleh Banerjee et al. (2019) terhadap evaluasi dampak dari program keuangan mikro di 27 negara berkembang mengungkapkan dampak moderat tetapi signifikan pada diversifikasi pendapatan dan ketahanan rumah tangga, meskipun efeknya pada pertumbuhan agregat lebih sulit diukur.

Di sisi permintaan, kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang meningkatkan kualitas pekerjaan dan mendukung peralihan ke sektor produktif berpotensi meningkatkan pengembalian sosial investasi. Studi oleh Levy dan Lopez-Calva (2020) menggunakan data tingkat perusahaan dari enam negara Amerika Latin menemukan bahwa program pelatihan yang dirancang bersama dengan asosiasi industri dan diselaraskan dengan kebutuhan sektor yang berkembang mencapai tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dalam meningkatkan produktivitas dan upah dibandingkan dengan program yang dijalankan secara terpisah dari

dinamika pasar.

Dalam lanskap kontemporer, kebijakan untuk mendukung transisi hijau juga menjadi semakin penting. Analisis Aghion et al. (2023) terhadap data inovasi hijau di 41 negara OECD menemukan bahwa kombinasi optimal antara kebijakan berbasis harga (seperti pajak karbon) dan dukungan langsung untuk R&D hijau menghasilkan dampak terbesar pada arah dan kualitas investasi. Mereka menekankan bahwa kebijakan iklim yang dirancang dengan baik tidak hanya dapat mengurangi emisi tetapi juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan produktivitas jangka panjang melalui inovasi dan realokasi investasi ke teknologi yang lebih efisien.

3.8. Kesimpulan dan Implikasi untuk Pembangunan Ekonomi

Pembahasan komprehensif dalam bab ini mengungkapkan evolusi signifikan dalam pemahaman kita tentang peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dari model awal Harrod-Domar yang menekankan hubungan linier antara tabungan, investasi, dan pertumbuhan, kita telah bergerak menuju pemahaman yang jauh lebih bernuansa yang mengakui pentingnya kualitas, komposisi, dan konteks

institusional investasi.

Bukti empiris dari berbagai negara dan kawasan menggarisbawahi beberapa kesimpulan penting. Pertama, meskipun investasi tetap menjadi determinan krusial pertumbuhan ekonomi, kontribusinya terhadap pertumbuhan bervariasi secara substansial berdasarkan konteks. Elastisitas pertumbuhan terhadap investasi berkisar dari 0,15 di negara-negara dengan institusi lemah hingga 0,40 di negara-negara dengan lingkungan institusional yang kuat.

Kedua, komposisi investasi sama pentingnya dengan volumenya. Investasi dalam modal manusia, R&D, dan infrastruktur digital menunjukkan pengembalian sosial yang semakin tinggi dalam ekonomi kontemporer, mencerminkan pergeseran menuju sumber pertumbuhan berbasis pengetahuan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari investasi ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang memastikan komplementaritas antara berbagai jenis modal.

Ketiga, kualitas investasi ditentukan oleh serangkaian faktor institusional, struktural, dan kebijakan. Negara-negara yang berhasil mengoptimalkan dampak pertumbuhan dari investasi telah memberikan perhatian cermat pada

pengembangan kapabilitas, perbaikan institusi, dan penciptaan lingkungan makroekonomi yang stabil.

Implikasi untuk pembangunan ekonomi adalah signifikan. Bagi pembuat kebijakan, fokus sempit pada meningkatkan volume investasi perlu digantikan oleh pendekatan yang lebih holistik yang menekankan peningkatan kualitas investasi. Ini mencakup reformasi institusional yang disesuaikan dengan konteks lokal, strategi untuk mengembangkan kapabilitas teknologi dan manajerial, serta kebijakan yang memastikan distribusi manfaat investasi secara luas.

Dalam tantangan kontemporer, seperti ketidakpastian global, disrupsi teknologi, atau yang terakhir, perubahan iklim, strategi investasi jangka panjang yang efektif tidak mungkin bisa tetap tidak berubah. Membangun suatu kerangka yang dapat diprediksi dan memberikan insentif yang jelas untuk investasi jangka panjang, policy makers perlu memperhitungkan fleksibilitas dan kemampuan kapasitas penyerapan inovasi investasi dalam menjawab kondisi yang berubah.

Area prioritas untuk penelitian yang memungkinkan di masa depan tentang peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi termasuk: Pertama, lebih memahami komplementaritas berbagai jenis investasi

dalam konteks pembangunan yang berbeda. Kedua, menjelajahi hubungan antara investasi, inovasi, dan produktivitas dalam ekonomi digita. Ketiga, analisis empiris investasi yang mendukung transisi hijau atau apa yang mungkin implikasinya untuk pertumbuhan jangka panjang.

Pembangunan tidak dilihat hanya sebagai proses akumulasi modal, namun sebagai proses organisasi proses perubahan, seperti yang ditunjukkan dengan baik oleh Stiglitz dan Hoff (2001). Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun investasi tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, cara kita memahami, mengukur, dan memfasilitasi investasi perlu berkembang untuk mencerminkan kompleksitas dan dinamika ekonomi kontemporer.

BAB IV

INFRASTRUKTUR SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN

4.1. Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur adalah seperangkat fasilitas fisik dan sistem dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur mencakup berbagai elemen penting seperti transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), energi (listrik, gas), komunikasi (telekomunikasi dan internet), air bersih, sanitasi, serta layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut Grigg (1988), infrastruktur merupakan struktur dasar yang mendukung sistem kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Infrastruktur tidak hanya menjadi penopang kegiatan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan distribusi pembangunan.

Sementara itu, Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa infrastruktur merupakan bagian dari investasi publik yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang memadai dapat mempercepat konektivitas, menurunkan biaya logistik, serta menciptakan peluang kerja dan investasi.

Secara umum, infrastruktur terbagi menjadi dua jenis utama:

1. **Infrastruktur Fisik (Hard Infrastructure):** fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan sarana transportasi.
2. **Infrastruktur Sosial (Soft Infrastructure):** sistem non-fisik yang mendukung fungsi sosial, seperti institusi hukum, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan regional, memperluas akses layanan dasar, dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

4.2. Hubungan Antara Infrastruktur dan Pertumbuhan

Infrastruktur memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi, penciptaan lapangan

kerja, serta daya saing ekonomi nasional.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Infrastruktur termasuk dalam komponen modal publik yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunkan biaya transaksi ekonomi (Barro, 1990). Misalnya, jalan yang baik mempercepat distribusi barang, pelabuhan yang efisien memperlancar perdagangan, dan sistem komunikasi yang maju mendukung pertukaran informasi bisnis.

Studi empiris oleh Aschauer (1989) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur publik secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan output nasional. Di negara-negara berkembang, infrastruktur yang memadai juga penting untuk menarik investasi asing dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Dalam konteks jangka panjang, investasi infrastruktur menjadi katalis pertumbuhan inklusif. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan, misalnya, membentuk kualitas sumber daya manusia yang produktif. Selain itu, infrastruktur juga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang mendorong aktivitas sektor-sektor lain.

Namun demikian, tidak semua pembangunan infrastruktur otomatis menghasilkan pertumbuhan. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tata kelola, perencanaan, pemeliharaan, serta kesinambungan investasi. Infrastruktur yang tidak terkelola dengan baik justru dapat membebani fiskal negara dan menimbulkan inefisiensi.

4.3. Peran Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan

Infrastruktur merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tanpa infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh tingginya biaya logistik, rendahnya aksesibilitas, dan terbatasnya konektivitas antarwilayah. Berikut adalah peran dari beberapa jenis infrastruktur strategis dalam mendorong pertumbuhan:

1. Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi meliputi jalan raya, jembatan, rel kereta, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur ini berperan penting dalam:

- a. Mengurangi biaya logistik dan mempercepat distribusi barang dan jasa.
- b. Meningkatkan akses pasar, baik domestik maupun internasional.

- c. Mendorong mobilitas tenaga kerja, sehingga produktivitas meningkat.
- d. Membuka wilayah tertinggal, mendorong pemerataan pembangunan.

Contoh nyata dapat dilihat pada pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra di Indonesia yang memperpendek waktu tempuh dan mendukung arus barang antarwilayah.

2. Infrastruktur Energi

Energi merupakan elemen vital dalam mendukung aktivitas industri, rumah tangga, dan sektor jasa. Peran utamanya meliputi:

- a. Menjamin ketersediaan energi listrik dan bahan bakar untuk mendukung produktivitas ekonomi.
- b. Mendorong investasi industri, terutama di sektor manufaktur dan tambang.
- c. Menurunkan biaya produksi, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan pasokan listrik.
- d. Mendukung transisi ke energi terbarukan, yang juga membuka sektor baru dalam ekonomi hijau.

Ketidakstabilan pasokan energi dapat menyebabkan stagnasi investasi dan menurunkan kepercayaan investor.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

TIK mencakup jaringan internet, telekomunikasi, pusat data, dan sistem digital lainnya. Peran utamanya dalam pertumbuhan ekonomi adalah:

- a. Mempercepat arus informasi dan transaksi ekonomi secara real-time.
- b. Mendukung pertumbuhan ekonomi digital, termasuk e-commerce dan startup teknologi.
- c. Memperluas akses layanan pendidikan, kesehatan, dan keuangan secara daring.
- d. Meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi melalui e-government.

Digitalisasi menjadi kunci pertumbuhan baru, terutama pasca pandemi, di mana konektivitas menjadi kebutuhan utama.

4. Infrastruktur Sosial (Pendidikan dan Kesehatan)

Infrastruktur sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan jangka panjang. Perannya antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi motor utama pertumbuhan produktif.
- b. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui akses yang lebih merata terhadap layanan dasar.
- c. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan yang lebih baik.
- d. Menjaga kesehatan masyarakat, yang berdampak pada efisiensi dan produktivitas kerja.

Sekolah, rumah sakit, pusat pelatihan, dan fasilitas layanan publik lainnya merupakan investasi jangka panjang yang memberikan efek ganda (multiplier effect) pada pertumbuhan.

4.4. Dampak Ekonomi dari Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur yang memadai memperkuat fondasi perekonomian, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendorong aktivitas ekonomi lintas sektor.

1. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Infrastruktur seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi mempercepat proses produksi dan distribusi. Akses transportasi yang baik, misalnya, mengurangi biaya logistik dan memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing ekonomi nasional.

2. Mendorong Investasi

Ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi daya tarik utama bagi investasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Investor lebih cenderung menanamkan modalnya di wilayah yang memiliki akses listrik, air, internet, dan transportasi yang lancar.

3. Menciptakan Lapangan Kerja

Proyek pembangunan infrastruktur menyerap banyak tenaga kerja, baik saat konstruksi maupun dalam tahap operasional. Efek berganda (multiplier effect) juga terjadi karena meningkatnya permintaan bahan bangunan, logistik, dan layanan pendukung lainnya.

4. Memperkuat Konektivitas dan Integrasi Wilayah

Pembangunan jalan dan jembatan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi, membuka akses

terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

5. Meningkatkan Pendapatan Negara

Infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara yang efisien meningkatkan volume ekspor dan impor, yang berdampak pada peningkatan pendapatan negara dari pajak dan bea masuk.

6. Menstimulasi Pertumbuhan Sektor Lain

Pembangunan infrastruktur mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain seperti properti, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Infrastruktur TIK, misalnya, menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital.

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak ekonomi positif hanya akan tercapai bila pembangunan infrastruktur dilakukan dengan perencanaan yang matang, transparansi, dan tata kelola yang baik. Jika tidak, justru bisa menimbulkan beban utang, korupsi, dan ketimpangan pembangunan.

4.5. Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia memandang infrastruktur sebagai pilar utama pembangunan nasional. Untuk itu, berbagai strategi dan kebijakan telah dirancang guna mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata, berkelanjutan, dan inklusif. Strategi ini tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Melalui RPJMN 2020–2024, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama nasional. Fokus kebijakan mencakup:
 - a. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api.
 - b. Pemerataan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan internet di daerah tertinggal.
 - c. Penguatan infrastruktur kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pemerintah membentuk daftar Proyek Strategis Nasional untuk diprioritaskan dari sisi pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan. PSN mencakup sektor transportasi, energi, air, dan kawasan industri.

3. Pendanaan Alternatif Melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)
Untuk mengurangi beban APBN, pemerintah mendorong skema Public-Private Partnership (PPP) dalam pendanaan infrastruktur. Contohnya termasuk proyek bandara, pembangkit listrik, dan infrastruktur digital.
4. Peningkatan Tata Kelola dan Regulasi
 - a. Penyederhanaan perizinan (melalui OSS dan UU Cipta Kerja).
 - b. Penguatan peran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam pembebasan lahan.
 - c. Penerapan prinsip Value for Money dalam pengadaan proyek.
5. Transformasi Digital dan Smart Infrastructure
Pemerintah juga mendorong integrasi teknologi dalam pembangunan, seperti smart city, transportasi cerdas, dan digitalisasi layanan publik, demi efisiensi dan transparansi proyek.

6. Komitmen Terhadap Infrastruktur Berkelanjutan

Indonesia turut menargetkan infrastruktur yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ini tercermin dalam pengembangan energi terbarukan, bangunan hijau, dan sistem transportasi rendah emisi.

4.6. Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, yang menjadikan infrastruktur sebagai tantangan sekaligus kunci dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selama dua dekade terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat konektivitas, energi, dan layanan dasar.

1. Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra

Pemerintah Indonesia mengembangkan jaringan jalan tol nasional untuk meningkatkan konektivitas antarkota dan menurunkan biaya logistik. Jalan Tol Trans-Jawa telah

menghubungkan Merak hingga Banyuwangi, sementara Tol Trans-Sumatra terus dibangun dari Lampung ke Aceh.

Dampaknya:

- a. Mempercepat distribusi barang dan orang.
- b. Menarik investasi ke wilayah yang sebelumnya kurang berkembang.
- c. Menurunkan biaya logistik nasional, yang sebelumnya mencapai 23% dari PDB.

2. Proyek Palapa Ring (Infrastruktur Digital)

Palapa Ring adalah proyek serat optik nasional yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan internet berkecepatan tinggi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dampaknya:

- a. Memperluas akses internet di wilayah timur Indonesia.
- b. Mendukung pengembangan ekonomi digital, UMKM berbasis daring, dan pendidikan jarak jauh.
- c. Mendorong pemerataan informasi dan layanan publik berbasis teknologi.

3. Pembangunan Infrastruktur Energi (PLTU, PLTA, PLTS)

Proyek 35.000 MW adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas energi nasional melalui pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi.

Dampaknya:

- a. Meningkatkan elektrifikasi nasional hingga >98% pada 2023.
 - b. Mendorong pertumbuhan industri dan rumah tangga produktif di daerah.
 - c. Mendukung transisi energi ke sumber terbarukan (PLTS, PLTB, dan geothermal).
4. Revitalisasi Pelabuhan dan Bandara

Pemerintah melakukan modernisasi pelabuhan seperti Tanjung Priok, Patimban, dan Makassar New Port, serta bandara seperti Kertajati dan YIA (Yogyakarta International Airport).

Dampaknya:

- a. Meningkatkan arus barang dan penumpang.
- b. Menurunkan waktu dwelling time ekspor-impor.
- c. Meningkatkan konektivitas internasional dan mendukung pariwisata.

BAB V

PERAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membangun sumber daya manusianya secara optimal. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh investasi fisik dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Pendidikan yang berkualitas melahirkan insan-insan berpengetahuan yang kelak memiliki daya inovasi, kreativitas, serta akhlak mulia. Sementara itu, kesehatan yang baik akan memastikan produktivitas seluruh lapisan masyarakat terjaga secara optimal. Kedua faktor ini saling berkaitan dan membentuk fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Safitri & Noviarita, 2022).

Secara konseptual, pendidikan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu. Keterampilan dan kompetensi inilah yang kelak akan

memungkinkan setiap individu dapat berkontribusi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Sementara itu, kesehatan yang baik akan berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kontribusi yang optimal dan efisien. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan akses layanan kesehatan yang baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan (Frederich et.al, 2023). Dengan kata lain, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan bukanlah hanya kebijakan sosial yang harus dipenuhi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat juga merupakan strategi ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara di tingkat global (Sharma, 2022).

Bab ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai peran pendidikan dan kesehatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembahasan ini akan mencakup hubungan teoritis antara modal manusia dan pembangunan ekonomi, dampak nyata dari investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di kedua sektor tersebut. Dengan memahami keterkaitan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih

komprehensif mengenai strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada penguatan sumber daya manusia.

5.1. Pendidikan sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu teori yang paling mendasar dalam memahami hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah Human Capital Theory atau Teori Modal Manusia. Teori ini menekankan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu. Hasil dari proses pendidikan adalah para individu yang siap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kualitas tenaga kerja yang tinggi dengan dukungan pendidikan yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi produksi serta inovasi dalam berbagai sektor industri (Safitri & Noviarita, 2022). Sementara itu, Hasan et al. (2023) turut menambahkan bahwa modal keterampilan manusia tidak hanya mencakup keterampilan teknis semata. Akan tetapi, modal keterampilan manusia turut mencakup aspek kognitif, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar dalam ekonomi modern. Oleh karena itu, negara yang berinvestasi dalam

pendidikan cenderung memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat di tingkat global.

Pendidikan juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan peran pendidikan dalam memberikan dampak kumulatif terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan kapasitas individu untuk menghasilkan nilai tambah dalam jangka panjang (Frederich et al, 2023). Selain itu, Sharma (2022) turut mendukung argumentasi tersebut dengan menjelaskan bahwa negara-negara yang mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Hal ini disebabkan oleh peningkatan literasi, keterampilan kerja, serta inovasi yang dihasilkan oleh individu yang mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Dengan demikian, investasi pendidikan bukan hanya memberikan manfaat bagi individu secara pribadi, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan dengan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan berdaya saing.

Hubungan antara tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja telah menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian ekonomi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang

lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (Sharma, 2022). Selain itu, Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi serta produktivitas yang lebih besar. Hal ini dapat dijelaskan oleh pembentukan pola pikir inovatif dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan ekonomi global, yang didapatkan oleh para individu yang meneruskan jenjang pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi (Frederich et al., 2023). Oleh karena itu, semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu populasi, semakin besar kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

5.2. Dampak Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memainkan peran krusial dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di era modern. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan lebih baik dalam menciptakan dan mengadopsi teknologi baru (Sharma, 2022). Hal ini yang kelak akan meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri. Frederich et al. (2023)

turut menambahkan bahwa sistem pendidikan yang mendorong riset dan pengembangan (Research and Development) berkontribusi langsung terhadap peningkatan jumlah paten, penemuan, serta adopsi teknologi yang lebih canggih dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Hasan et al. (2023), yang menyatakan bahwa negara-negara dengan investasi tinggi dalam pendidikan berbasis sains dan teknologi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih pesat karena peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan industri berbasis inovasi.

Selain berkontribusi terhadap inovasi, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. mengungkapkan bahwa Akses pendidikan yang lebih luas memungkinkan individu dari latar belakang ekonomi rendah untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi (Sharma, 2022). Pendidikan dapat menjadi alat utama dalam memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Peluang yang lebih besar dalam mendapatkan hingga menciptakan pekerjaan yang stabil dan berkualitas dimiliki oleh para individu yang memiliki akses ke pendidikan tinggi (Frederich et al, 2023). Kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata dapat membantu

mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dengan meningkatkan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem ekonomi formal (Hasan et al, 2023).

Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan Finlandia dalam membangun sistem pendidikan berbasis kualitas tinggi adalah berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan inovasi. Hal ini yang pada akhirnya meningkatkan daya saing tenaga kerja Finlandia pada tingkat global (Sharma, 2022). Selain Finlandia, terdapat Korea Selatan yang menekankan fokus pada sains dan teknologi. Hal ini mendorong Korea Selatan sebagai salah satu pusat industri berbasis inovasi di dunia (Frederich et al, 2023). Sementara itu, Jerman menganut sistem pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan industri. Sistem ini berhasil menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mampu memenuhi kriteria industri yang dibutuhkan. Dengan ini, Jerman juga berhasil mengurangi angka pengangguran secara signifikan (Hasan et al., 2023).

Dengan melihat dampak positif pendidikan terhadap inovasi, mobilitas sosial, dan pertumbuhan

ekonomi di berbagai negara, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Investasi dalam pendidikan tidak hanya menciptakan individu yang lebih produktif, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut mengenai tantangan dan strategi kebijakan pendidikan akan menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana sektor ini dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5.3. Tantangan dan Hambatan dalam Sektor Pendidikan

Meskipun pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, tantangan dan hambatan dalam sektor ini masih menjadi kendala bagi banyak negara, termasuk di Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Safitri & Noviarita (2022) mengungkapkan bahwa akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan akibat kurangnya infrastruktur, tenaga pengajar, serta sumber daya pendidikan yang berkualitas. Hal ini berdampak

terhadap tingkat putus sekolah anak-anak di wilayah pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan. Kesenjangan ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan tenaga kerja di daerah terpencil. Dengan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat di area pedesaan, pertumbuhan ekonomi regional akan semakin terhambat. Hal ini yang turut memperbesar disparitas sosial ekonomi (Hasan et al., 2023).

Selain masalah akses, tantangan lain dalam sektor pendidikan adalah kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, sistem pendidikan masih berorientasi pada teori tanpa memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja (Sharma, 2022). Hal ini menyebabkan kesenjangan antara lulusan dan permintaan industri. Tidak sedikit lulusan yang merasa kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi yang telah ditekuni. Frederich et al. (2023) menyoroti bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar cenderung mengalami pengangguran tenaga kerja terdidik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kurikulum yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan

industri agar pendidikan dapat benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Tantangan lainnya terdapat pada pembiayaan pendidikan. Masih terdapat lapisan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih menganggap bahwa pendidikan adalah kebutuhan tersier dikarenakan biaya yang sangat besar. Keterbatasan anggaran pendidikan selalu menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan kualitas sekolah, pelatihan guru-guru, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai (Safitri & Noviarita, 2022). Indonesia turut mengalami permasalahan ini, dengan anggaran pendidikan yang terus bersaing dengan kebutuhan sektor lain seperti kebutuhan infrastruktur dan program-program pemerintah yang sangat ambisius. Hasan et al. (2023) menambahkan bahwa ketergantungan pada pembiayaan publik tanpa melibatkan sektor swasta dapat menghambat inovasi dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, kerja sama pemerintah dan sektor swasta perlu dalam pembiayaan pendidikan menjadi strategi yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan.

Peran pemerintah dalam mengatasi hambatan pendidikan sangatlah krusial. Pemerintah perlu

menciptakan kebijakan yang tegas, inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan seperti subsidi pendidikan, program beasiswa, dan peningkatan kualitas guru dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan (Sharma, 2022). Frederich et al. (2023) juga menyoroti pentingnya regulasi yang memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak bagi segelintir kelompok, tetapi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di beberapa negara maju, kebijakan pendidikan yang bersinergi dengan sektor industri telah membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi tantangan global.

Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, upaya peningkatan pendidikan harus dilakukan secara komprehensif. Keterlibatan pemerintah, dunia industri, dan masyarakat amat diperlukan dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diberikan pada seluruh lapisan masyarakat. Tanpa adanya strategi yang tepat, pendidikan justru menjadi sesuatu yang tidak dapat digapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat dalam mengeksplorasi berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam sektor pendidikan. Perlu dipastikan juga bahwa

pendidikan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

5.4. Kesehatan sebagai Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Kesehatan adalah aset fundamental bagi masyarakat yang secara langsung menentukan produktivitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil. Kontribusi warga negara sebagai tenaga kerja akan semakin optimal apabila tiap individu terjaga kesehatannya. Sebaliknya, negara yang mengalami krisis kesehatan menghadapi penurunan produktivitas, peningkatan beban kesehatan, serta kesenjangan ekonomi yang semakin melebar (Safitri & Noviarita, 2022). Oleh karena itu, investasi dalam sektor kesehatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat daya saing ekonomi suatu negara dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi, kesehatan merupakan bagian integral dari modal manusia. Hal ini berarti bahwa kesehatan memiliki peran krusial dalam menentukan kapasitas seorang individu dalam

menjalankan segala aktivitasnya secara optimal. Sharma (2022) menjelaskan bahwa individu yang sehat memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, kemampuan kognitif yang lebih baik, serta daya tahan fisik yang lebih kuat, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan produktif. Aurelya et al. (2022) menambahkan bahwa negara-negara dengan investasi kesehatan yang baik mengalami peningkatan pada kualitas sumber daya manusianya. Hal ini yang akan mendorong inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, kesehatan bukan hanya berperan sebagai faktor pendukung, tetapi sebagai fondasi utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hubungan antara status kesehatan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja sangat erat dan saling mempengaruhi. Pekerja dengan status kesehatan yang buruk cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih tinggi, keterbatasan dalam melakukan tugas fisik dan mental, serta penurunan kinerja secara keseluruhan (Safitri & Noviarita, 2022). Sebaliknya, tenaga kerja yang sehat lebih mampu bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Perbaikan dalam layanan kesehatan seperti pada akses terhadap gizi yang baik serta perawatan medis yang memadai, dapat meningkatkan harapan hidup dan

memperpanjang masa kerja produktif individu. Dampak positif dari terwujudnya hal-hal tersebut adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan (Sharma, 2022).

Dampak kesehatan terhadap pengurangan kemiskinan juga sangat signifikan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang baik akan lebih produktif dalam partisipasinya pada kegiatan ekonomi. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga (Aurelya et al., 2022). Sebaliknya, rendahnya kualitas kesehatan sering kali menyebabkan hilangnya hari kerja, menurunnya pendapatan, serta meningkatnya beban ekonomi keluarga. Hal ini akan memperparah tingkat kemiskinan suatu wilayah. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkualitas menjadi elemen yang sangat penting dalam strategi pembangunan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

5.5. Dampak Kesehatan terhadap Produktivitas dan Pembangunan Ekonomi

Kesehatan masyarakat memiliki dampak langsung terhadap produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa faktor utama yang

menentukan kualitas tenaga kerja adalah status gizi, tingkat penyebaran penyakit menular, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Kekurangan gizi, terutama pada usia dini, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan kapasitas kognitif. Hal ini amat mengganggu dikarenakan dampaknya pada kemampuan produktivitas yang rendah saat individu memasuki dunia kerja (Safitri & Noviarita, 2022). Selain itu, kemungkinan penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan infeksi pernapasan dapat meningkatkan angka ketidakhadiran tenaga kerja, menurunkan produktivitas ekonomi, serta membebani sistem kesehatan negara. Oleh karena itu, investasi dalam pemenuhan gizi dan pengendalian penyakit menular menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Akses terhadap layanan kesehatan juga memainkan peran yang krusial dalam menjaga keberlangsungan produktivitas tenaga kerja. Negara dengan sistem kesehatan yang baik memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi, serta angka kematian dini yang lebih rendah (Sharma, 2022). Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah, menyebabkan kesenjangan kesehatan yang semakin

melebar dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang memberikan perlindungan kesehatan universal cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih sehat dan lebih stabil secara ekonomi. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh sedikitnya beban masyarakat mengenai kebutuhan akses kesehatan yang biasanya amat memusingkan pada negara-negara berkembang (Aurelya et al., 2022).

Kesehatan ibu dan anak merupakan fondasi bagi generasi produktif di masa depan. Hasan et al. (2023) menegaskan bahwa kesehatan ibu selama masa kehamilan dan setelah melahirkan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, baik dari segi fisik maupun kognitif. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang baik sejak dini cenderung memiliki keterbatasan dalam pendidikan dan keterampilan kerja di masa depan. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya mengurangi potensi kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional di masa mendatang. Safitri & Noviarita (2022) juga menunjukkan bahwa program kesehatan ibu dan anak yang efektif dapat menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu,

pemerintah perlu memastikan program-program yang dirancang dalam mendukung gizi pada ibu dan anak dicetuskan dengan melihat kebutuhan utamanya, dan tidak sekedar pemberian pangan semata.

Pada berbagai penelitian internasional, kebijakan kesehatan yang efektif terbukti mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sharma (2022) menyoroti kebijakan di Jepang dalam menyediakan layanan kesehatan universal. Hal ini berhasil meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Jepang yang sekaligus mempertahankan produktivitas tenaga kerja hingga usia lanjut. Sementara itu, di Korea Selatan berlangsung investasi besar-besaran program kesehatan masyarakat. Investasi pada kesehatan di Korea Selatan sudah termasuk penyediaan layanan vaksinasi dan pengendalian penyakit menular. Hal ini telah membantu negara tersebut mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya saing global (Aurelya et al., 2022).

Di Benua Eropa, Jerman dikenal dengan sistem jaminan kesehatannya yang komprehensif. Jaminan kesehatan di Jerman memungkinkan setiap warganya mendapatkan akses layanan medis berkualitas tanpa terbebani oleh biaya yang besar (Hasan et al., 2023).

Sistem seperti ini tidak hanya memastikan kesejahteraan masyarakatnya saja, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi dengan mengurangi angka ketidakhadiran kerja akibat penyakit. Sementara itu, di Amerika Latin, Chile telah menerapkan reformasi kesehatan yang memperluas akses bagi kelompok ekonomi lemah. Hal ini meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan kelompok tenaga kerja yang lebih produktif (Safitri & Noviarita, 2022).

Dari berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada sektor kesehatan juga menjadi strategi keberlanjutan ekonomi yang efektif dalam jangka panjang. Negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih sehat, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan daya saing ekonomi secara global. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk terus mengembangkan sistem kesehatan yang adaptif dan merata agar dapat menghadapi tantangan ekonomi masa depan dengan lebih baik.

5.6. Tantangan dalam Pembangunan Kesehatan

Sama halnya dengan sektor pendidikan, sektor kesehatan masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses yang tidak merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Safitri & Noviarita (2022) mengungkapkan bahwa di banyak negara berkembang, fasilitas kesehatan lebih terkonsentrasi di kota-kota besar. Sementara itu, masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan layanan medis dasar. Kurangnya tenaga medis, infrastruktur kesehatan yang minim, serta keterbatasan transportasi menjadi kendala utama dalam pemerataan layanan kesehatan. Akibatnya, angka kematian yang tidak dapat dihindarkan lebih tinggi ditemukan pada daerah pedesaan. Masyarakat di wilayah tersebut turut lebih rentan terhadap penyakit menular dan masalah kesehatan kronis.

Selain keterbatasan akses, tingginya biaya kesehatan menjadi beban ekonomi yang berat bagi rumah tangga miskin. Tanpa adanya sistem perlindungan sosial yang memadai, biaya pengobatan yang mahal dapat mendorong banyak keluarga jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan (Sharma, 2022). Aurelya et al. (2022) menambahkan bahwa dalam banyak kasus, rumah tangga dengan pendapatan rendah harus memilih antara memenuhi kebutuhan dasar atau

membayai perawatan kesehatan. Tidak jarang kondisi ini mengakibatkan kesehatan masyarakat yang memburuk, hingga menurunkan produktivitas ekonomi mereka. Oleh karena itu, kebijakan subsidi kesehatan dan program asuransi yang inklusif menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa menghadapi kesulitan finansial.

Di sisi lain, inovasi dan teknologi memiliki peran yang semakin besar dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Perkembangan teknologi telemedicine telah membuka peluang bagi masyarakat di daerah terpencil untuk berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh (Hasan et al., 2023). Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan *big data* dalam diagnosis penyakit dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan serta mempercepat proses pengobatan. Inovasi dalam produksi obat-obatan serta peningkatan teknologi medis telah membantu menurunkan angka kematian akibat penyakit yang sebelumnya sulit diobati (Safitri & Noviarita, 2022).

Meskipun inovasi teknologi membawa perubahan positif, masih terdapat tantangan dalam pengadopsian dan implementasinya, terutama di negara-negara

dengan sumber daya terbatas. Biaya pengadaan teknologi medis yang canggih masih menjadi kendala utama. Selain itu, setiap individu dalam masyarakat belum tentu memiliki literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan kesehatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, selain mendorong pengembangan inovasi, pemerintah juga harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil dan program pelatihan bagi tenaga medis tersedia secara luas. Dengan pendekatan yang komprehensif, tantangan dalam pembangunan kesehatan dapat diatasi secara bertahap. Dengan struktur tersebut, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.7. Sinergi antara Pendidikan dan Kesehatan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Tidak ada bangsa yang dapat maju dalam perekonomiannya tanpa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh dua faktor utama, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan membentuk pola pikir dan kemampuan setiap individu menjadi terampil dan

inovatif. Sementara itu, kesehatan berperan sebagai kekuatan setiap individu agar dapat beraktivitas secara produktif dan berkelanjutan. Safitri & Noviarita (2022) menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan bukanlah dua sektor yang berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam menciptakan modal manusia yang unggul. Individu yang sehat memiliki kapasitas belajar yang lebih baik. Sedangkan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kesadaran masyarakat seberapa krusialnya menjaga kesehatan diri. Oleh karena itu, sinergi antara kedua sektor ini menjadi kunci utama dalam membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan.

Interaksi antara pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai aspek. Mari kita telusuri dari siklus anak-anak. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik, sehingga mereka lebih mampu menyerap ilmu di sekolah (Sharma, 2022). Sebaliknya, anak-anak yang kekurangan gizi atau sering mengalami gangguan kesehatan cenderung mengalami kesulitan dalam belajar sehingga memiliki performa akademik yang lebih rendah. Aurelya et al. (2022) menambahkan bahwa investasi dalam sektor kesehatan, seperti pada

vaksinasi dan perawatan kesehatan ibu dan anak, memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Dengan kata lain, pendidikan dan kesehatan harus dikembangkan secara bersamaan agar dapat menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi global.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, diperlukan kebijakan terpadu yang menyelaraskan sektor pendidikan dan kesehatan secara lebih sistematis dan efisien. Hasan et al. (2023) menekankan bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan pendidikan dan kesehatan yang saling mendukung cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Kurikulum pendidikan yang memasukkan aspek kesehatan dinilai sangat penting dalam menanamkan keterkaitan antara pendidikan dan kesehatan. Pembelajaran akan pola makan sehat dan pentingnya aktivitas fisik, dapat membantu membangun pola hidup yang lebih baik sejak usia dini. Pemenuhan gizi setiap siswa juga dipercaya akan mampu meningkatkan kesehatan dan penyerapan pendidikan. Namun, program tersebut haruslah dirancang dengan matang dan tidak mengganggu sektor-sektor krusial lainnya yang harus dijalankan secara selaras.

Beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan kebijakan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Keberhasilan Finlandia dalam menerapkan kebijakan kesehatan dan pendidikan gratis telah menghasilkan tenaga kerja yang lebih sehat, terdidik, dan produktif. Selain Finlandia, Singapura menjadi contoh nyata negara Asia Tenggara yang telah berhasil menyelaraskan pendidikan dan kesehatan. Singapura memiliki sistem pendidikan berbasis keterampilan yang sangat baik. Selain itu, terdapat layanan kesehatan berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh seluruh warganya. Kombinasi ini telah membantu negara tersebut mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan daya saing global yang kuat.

Korea Selatan turut menjadi salah satu contoh negara yang sukses dalam mengembangkan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang selaras. Aurelya et al. (2022) menjelaskan bahwa Korea Selatan mengalokasikan investasi yang sangat besar untuk pendidikan berkualitas tinggi, disertai dengan program kesehatan nasional yang memastikan seluruh warganya mendapatkan perawatan yang baik. Program-program ini berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengurangan angka ketidakhadiran akibat

masalah kesehatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi meningkat dengan pesat. Keberhasilan Korea Selatan menunjukkan bagaimana kebijakan yang menghubungkan kesehatan dan pendidikan dapat memberikan efek multiplier terhadap perkembangan ekonomi suatu negara (Hasan et al., 2023).

Dengan memahami pentingnya sinergi antara pendidikan dan kesehatan, berbagai negara dapat mengadopsi strategi serupa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing. Investasi dalam kedua sektor ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan dan kesehatan benar-benar menjadi fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa.

5.8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sementara

kesehatan memastikan bahwa individu dapat bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Seperti yang telah dibahas, kedua sektor ini tidak dapat dipisahkan. Setiap individu yang sehat memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, sedangkan pendidikan yang baik meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan (Safitri & Noviarita, 2022). Negara-negara yang berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan secara bersamaan cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, serta daya saing global yang lebih kuat (Sharma, 2022).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pendidikan dan kesehatan, kebijakan yang lebih terintegrasi dan strategis perlu diterapkan. Pemerintah harus memperluas akses pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini harus diupayakan agar tenaga kerja dapat lebih siap bersaing dalam ekonomi modern (Hasan et al., 2023). Pada sektor kesehatan, memperkuat layanan kesehatan primer, terutama di daerah terpencil adalah hal yang sangat krusial. Hal ini dapat didukung dengan menyertakan peningkatan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat sejak usia dini (Aurelya et al., 2022). Kombinasi

kebijakan pendidikan dan kesehatan yang tepat akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif dan mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Investasi di sektor pendidikan dan kesehatan juga harus didukung oleh kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan. Banyak negara telah membuktikan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Sharma, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pendanaan kedua sektor tersebut tidak hanya bergantung pada anggaran negara yang minim, tetapi juga melibatkan partisipasi sektor swasta dan organisasi internasional. Kerja sama antara sektor publik dan pihak swasta dalam pendidikan vokasional dan layanan kesehatan berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat (Hasan et al., 2023).

Tantangan utama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, baik dari segi geografis maupun sosial ekonomi. Daerah pedesaan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu,

kebijakan afirmatif seperti program beasiswa bagi siswa kurang mampu serta peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil perlu terus diperkuat. Pemerintah juga harus mengoptimalkan teknologi digital untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Teknologi seperti telemedicine dan platform pembelajaran daring sangat memudahkan dalam menjangkau lebih banyak masyarakat yang kurang mampu (Aurelya et al., 2022).

Selain kebijakan di tingkat nasional, kerja sama internasional juga dapat mempercepat pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Banyak negara maju yang telah berhasil mengembangkan sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang efektif melalui inovasi dan kebijakan berbasis riset. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara seperti Finlandia, Korea Selatan, Singapura, dan Jerman dalam mengintegrasikan kebijakan pendidikan dan kesehatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Adaptasi kebijakan dari negara-negara tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pendidikan dan kesehatan bukan hanya faktor pendukung keberlanjutan ekonomi suatu negara. Kedua

sektor tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Negara yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus berinvestasi secara serius dalam kedua sektor ini, disertai dengan kebijakan yang optimal, strategis dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya dan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat.

BAB VI

GLOBALISASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

6.1. Pendahuluan

Globalisasi adalah fenomena yang telah mengubah wajah perekonomian dunia dalam beberapa dekade terakhir. Proses globalisasi mengacu pada peningkatan keterhubungan dan saling ketergantungan antara negara-negara di berbagai belahan dunia dalam hal perdagangan, investasi, teknologi, dan mobilitas tenaga kerja. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, globalisasi telah membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, dampak lingkungan, dan ketergantungan terhadap negara-negara maju yang memengaruhi kemandirian ekonomi negara berkembang.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, globalisasi dapat memberikan dampak yang signifikan baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi dapat

mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui akses ke pasar global, peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA), dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antar negara dan menyebabkan hilangnya daya saing sektor-sektor lokal, terutama bagi negara yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar global (Rodrik, 2018). Fenomena ini mendorong negara-negara untuk lebih mengoptimalkan kebijakan ekonomi domestik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan memanfaatkan peluang yang ada.

Namun demikian, peran globalisasi dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Perubahan dalam mobilitas tenaga kerja, arus informasi, serta penyebaran inovasi dan teknologi menjadi aspek-aspek penting yang turut memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara globalisasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (International Monetary Fund, 2020).

Pada bab ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep globalisasi, dampaknya terhadap pertumbuhan

ekonomi, serta tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh negara untuk mengelola dampak globalisasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga akan dianalisis.

6.2. Konsep Globalisasi Ekonomi

6.2.1. Definisi dan Karakteristik Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi mengacu pada proses integrasi ekonomi yang semakin meningkat di seluruh dunia, yang mencakup arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja melintasi batas-batas negara. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya berarti pertumbuhan perdagangan internasional, tetapi juga perubahan struktural dalam cara ekonomi global beroperasi, dengan saling ketergantungan antara negara dan pasar yang semakin mendalam. Menurut *World Trade Organization* (WTO), globalisasi ekonomi adalah "proses penyatuan pasar global untuk barang dan jasa, dengan meminimalkan hambatan perdagangan dan meningkatkan arus investasi

antar negara" (WTO, 2019).

Karakteristik utama dari globalisasi ekonomi meliputi:

1. Interdependensi Ekonomi: Negara-negara semakin bergantung satu sama lain untuk perdagangan, investasi, dan sumber daya. Ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan lagi dari ekonomi global (Stiglitz, 2002).
2. Peningkatan Perdagangan Internasional: Pengurangan hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, mempermudah aliran barang dan jasa antar negara (Krugman et al, 2018).
3. Mobilitas Kapital dan Investasi: Kemudahan dalam mengalirkan modal internasional, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio, telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang (Chenery, 2019).
4. Penyebaran Teknologi dan Inovasi: Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan transportasi, memungkinkan ide dan teknologi baru untuk tersebar lebih cepat di seluruh dunia (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016).

6.2.2. Faktor-Faktor yang Mendorong Globalisasi Ekonomi

Beberapa faktor kunci yang mendorong percepatan globalisasi ekonomi antara lain:

1. **Kemajuan Teknologi.** Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi (ICT), telah mengubah cara barang, jasa, dan informasi diperdagangkan di seluruh dunia. Teknologi transportasi yang lebih efisien dan murah, seperti pesawat dan kapal kargo besar, memungkinkan distribusi barang yang lebih cepat dan lebih murah. Di sisi lain, perkembangan internet dan platform digital mempermudah perdagangan elektronik (e-commerce) yang menghubungkan konsumen dan produsen dari berbagai negara secara langsung (Friedman, 2005).
2. **Perdagangan Bebas dan Pengurangan Hambatan Tarif.** Seiring dengan pembentukan organisasi internasional seperti WTO dan kesepakatan perdagangan bebas, banyak negara mengurangi atau menghilangkan tarif dan hambatan non-tarif

lainnya. Hal ini mempermudah aliran barang dan jasa antar negara. Perdagangan bebas tidak hanya meningkatkan volume perdagangan antar negara, tetapi juga mendorong kompetisi yang lebih sehat dan peningkatan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa (Baldwin, 2016).

3. Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing (PMA) langsung merupakan salah satu pendorong utama globalisasi ekonomi. Negara-negara berkembang, misalnya, mendapatkan keuntungan dari PMA yang membawa modal, teknologi baru, dan keterampilan manajerial yang mendukung pembangunan industri lokal. Di sisi lain, negara maju mendapatkan akses ke pasar baru dan sumber daya yang lebih murah. Menurut UNCTAD (2020), arus PMA global mencapai sekitar USD 1,5 triliun pada tahun 2019, dengan sebagian besar investasi masuk ke negara-negara berkembang, terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur.

6.2.3. Perbedaan antara Globalisasi Ekonomi dan Globalisasi Sosial-Budaya

Meskipun sering digunakan secara bersamaan, globalisasi ekonomi dan sosial-budaya memiliki dimensi yang berbeda. Globalisasi ekonomi berfokus pada arus barang, jasa, investasi, dan teknologi antar negara, sedangkan globalisasi sosial-budaya lebih merujuk pada penyebaran nilai-nilai, budaya, dan gaya hidup antar negara.

1. **Globalisasi Ekonomi:** Lebih menitikberatkan pada hubungan perdagangan, investasi, dan keuangan antar negara, yang berfokus pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Proses ini lebih terkait dengan struktur pasar, peraturan perdagangan, dan kebijakan ekonomi yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global (Held & McGrew, 2007).
2. **Globalisasi Sosial-Budaya:** Melibatkan penyebaran ide, nilai, budaya, dan identitas antara individu dan masyarakat di seluruh dunia. Ini mencakup migrasi, pertukaran budaya, dan pengaruh media global. Meskipun dapat mendukung perkembangan ekonomi melalui pertukaran pengetahuan dan ide, globalisasi sosial-budaya lebih

berkaitan dengan perubahan dalam gaya hidup, pola konsumsi, serta interaksi sosial dan budaya antar negara.

Perbedaan utama terletak pada tujuan dan dampaknya: globalisasi ekonomi lebih berfokus pada peningkatan efisiensi ekonomi dan aliran barang/jasa, sedangkan globalisasi sosial-budaya lebih berorientasi pada pertukaran sosial, budaya, dan identitas di tingkat individu dan masyarakat (Steger, 2013).

6.3. Dampak Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Globalisasi, sebagai fenomena yang melibatkan peningkatan interkoneksi dan saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana negara-negara dan sektor-sektor ekonomi di dalamnya mengelola perubahan yang terjadi. Pada bagian ini, akan dibahas secara mendalam dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

1. Dampak Positif Globalisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- a. Akses Pasar Global. Proses liberalisasi perdagangan dan pengurangan hambatan tarif telah membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk memasarkan produk mereka ke pasar internasional. Dengan membuka pasar internasional, negara-negara yang sebelumnya terbatas oleh pasar domestik dapat memanfaatkan potensi pasar yang lebih besar, meningkatkan ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, negara-negara seperti China dan India telah merasakan manfaat besar dari ekspansi pasar global dalam sektor manufaktur dan teknologi (World Bank, 2020).
- b. Peningkatan Produktivitas dan Inovasi. Dengan adanya globalisasi, perusahaan-perusahaan harus berinovasi untuk tetap kompetitif, sehingga mendorong kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, integrasi pasar global memberikan akses kepada negara-negara untuk mendapatkan teknologi dan praktik

terbaik dari negara maju yang dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi (Aghion & Howitt, 2014). Globalisasi juga mempercepat pergerakan informasi dan ide yang memfasilitasi pengembangan inovasi baru di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga teknologi digital.

- c. Transfer Teknologi dan Pengetahuan. Negara-negara berkembang dapat memanfaatkan transfer teknologi dari negara-negara maju melalui PMA atau kemitraan bisnis. Teknologi baru ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga memperkenalkan metode dan praktik manajerial yang lebih baik. Misalnya, sektor telekomunikasi di banyak negara berkembang telah berkembang pesat berkat transfer teknologi yang datang melalui perusahaan multinasional.

2. Dampak Negatif Globalisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- a. Ketimpangan Ekonomi Antar Negara. Negara-negara maju cenderung lebih diuntungkan dari proses globalisasi dibandingkan negara-negara berkembang,

yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi global yang lebih besar. Negara-negara maju memiliki infrastruktur, teknologi, dan akses pasar yang lebih baik, sementara negara berkembang sering kali kesulitan untuk bersaing dalam pasar global yang semakin terbuka (Piketty, 2014). Akibatnya, kesenjangan pendapatan antara negara kaya dan miskin semakin melebar, dengan negara berkembang cenderung tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

- b. Ketergantungan Ekonomi pada Negara Maju. Negara berkembang yang mengandalkan ekspor sumber daya alam atau barang-barang produksi rendah sering kali tidak dapat mengembangkan industri bernilai tambah yang cukup untuk membangun ekonomi yang mandiri. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanannya terhadap fluktuasi ekonomi global, seperti perubahan harga komoditas atau krisis finansial yang berasal dari negara-negara maju. Sebagai contoh, banyak negara penghasil minyak menghadapi

ketergantungan ekonomi yang sangat besar terhadap ekspor energi, yang menjadikan ekonomi mereka rentan terhadap perubahan harga minyak global.

- c. Dampak terhadap Sektor-Sektor Lokal, Seperti Industri Kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perusahaan besar, yang memiliki modal dan kapasitas produksi yang lebih besar, sering kali dapat memanfaatkan skala ekonomi yang lebih efisien, sementara usaha kecil kesulitan untuk bersaing di pasar global. Dalam banyak kasus, UMKM di negara berkembang tidak dapat mengakses pasar internasional karena terbatasnya teknologi, keterampilan, dan akses finansial. Sebagai contoh, banyak usaha kecil di negara berkembang yang terhimpit oleh produk murah dari negara-negara maju yang diproduksi dengan biaya yang lebih rendah berkat teknologi canggih dan modal yang lebih besar (UNCTAD, 2020). Hal ini menyebabkan berkurangnya lapangan kerja lokal dan melemahnya daya saing sektor-sektor ekonomi domestik.

6.4. Globalisasi Dan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek yang paling fundamental dalam globalisasi ekonomi. Proses globalisasi telah meningkatkan keterhubungan antar negara melalui aliran barang, jasa, dan modal. Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, perdagangan internasional telah menjadi pendorong utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mempercepat pertukaran teknologi, dan memperluas pasar untuk produk-produk negara tertentu. Di sisi lain, perdagangan internasional juga memberikan tantangan yang signifikan, baik dalam hal persaingan pasar maupun kebijakan perdagangan yang harus dihadapi oleh negara-negara.

6.4.1. Peran Perdagangan Internasional dalam Globalisasi

Perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam globalisasi ekonomi. Dengan semakin terbukanya pasar global, negara-negara memiliki akses yang lebih besar untuk menjual produk mereka ke pasar internasional, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memperoleh barang dan jasa

yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Melalui spesialisasi dan pembagian kerja global, negara-negara dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengakses barang dengan biaya yang lebih rendah.

Proses ini juga meningkatkan persaingan di pasar global, yang dapat mendorong inovasi dan efisiensi di antara produsen. Selain itu, perdagangan internasional memfasilitasi aliran modal dan PMA, yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif di negara-negara berkembang. Keuntungan-keuntungan ini menjadi lebih jelas dengan pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota yang diatur oleh kesepakatan internasional seperti yang disahkan oleh World Trade Organization (WTO).

Dalam konteks globalisasi, negara-negara tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga harus beradaptasi dengan dinamika global yang melibatkan pasar internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, peran perdagangan internasional dalam globalisasi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi global secara keseluruhan (Baldwin, 2016).

6.4.2. Teori-Teori Perdagangan Internasional yang Relevan

Beberapa teori perdagangan internasional klasik memberikan dasar pemahaman mengenai mengapa perdagangan antar negara dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Berikut adalah beberapa teori yang relevan:

1. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776). Menurut teori ini, suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional jika negara tersebut memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu barang lebih efisien dibandingkan negara lain. Dengan demikian, negara tersebut dapat mengekspor barang yang diproduksi lebih efisien dan mengimpor barang yang diproduksi dengan biaya lebih tinggi di dalam negeri. Meskipun teori ini memberikan penjelasan yang baik mengenai keunggulan perdagangan, banyak kasus di dunia nyata menunjukkan bahwa banyak

negara yang tidak selalu memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang.

2. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*). Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo pada awal abad ke-19. Berbeda dengan teori keunggulan mutlak, teori ini menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang, negara tersebut masih dapat memperoleh manfaat dari perdagangan jika mereka fokus pada produksi barang yang memiliki biaya oportunitas terendah. Dengan kata lain, meskipun suatu negara lebih buruk dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lain, negara tersebut tetap dapat diuntungkan dengan memproduksi barang yang relatif lebih efisien dan mengekspor barang tersebut ke negara lain. Teori ini menjadi dasar bagi banyak kebijakan perdagangan internasional, seperti liberalisasi perdagangan dan pembentukan zona perdagangan bebas.
3. Teori Heksagonal dan Teori Aliran Sumber Daya. Beberapa teori modern juga

mengembangkan pemahaman tentang aliran perdagangan internasional. Salah satunya adalah teori "heksagonal" yang menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk meningkatkan perdagangan dan meningkatkan daya saing global (Krugman, 1991). Selain itu, teori aliran sumber daya menekankan pentingnya peran modal, teknologi, dan tenaga kerja dalam aliran perdagangan internasional, yang semakin kuat seiring dengan kemajuan teknologi dan pengurangan hambatan perdagangan.

6.4.3. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Perdagangan dan Tarif

Globalisasi telah memaksa banyak negara untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka untuk lebih membuka pasar domestik mereka terhadap produk asing. Negara-negara yang sebelumnya menerapkan kebijakan proteksionisme, seperti tarif tinggi dan kuota, kini lebih cenderung mengurangi hambatan perdagangan untuk memperoleh akses yang lebih besar ke pasar internasional.

Penyusunan kebijakan perdagangan internasional yang lebih liberal ini sering kali dilakukan melalui perjanjian multilateral di bawah organisasi seperti WTO, yang bertujuan untuk menciptakan aturan perdagangan yang lebih terbuka dan adil antar negara. WTO berperan penting dalam mengatur perdagangan internasional dan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan subsidi yang diterapkan oleh negara-negara anggota (WTO, 2019). Kebijakan perdagangan bebas yang diperkenalkan oleh banyak negara berkembang, seperti yang tercermin dalam kesepakatan perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan North American Free Trade Agreement (NAFTA), memberikan manfaat dalam hal peningkatan volume perdagangan dan aliran investasi.

Beberapa negara maju yang telah meraih manfaat besar dari globalisasi sering kali menentang kebijakan yang dapat merugikan sektor domestik mereka, seperti yang terlihat dalam beberapa debat terkait tarif dan kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintahan di negara-negara seperti Amerika Serikat (Baldwin,

2016). Kebijakan tarif yang lebih tinggi dan praktik proteksionisme lainnya dapat menghambat integrasi pasar global dan mengurangi manfaat dari globalisasi. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan perdagangan yang tepat dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari perdagangan internasional dapat dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang.

6.5. Globalisasi Dan Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) langsung, memainkan peran yang sangat penting dalam proses globalisasi ekonomi. Sebagai salah satu komponen utama dalam aliran modal global, PMA membawa banyak manfaat bagi negara penerima investasi, baik dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan infrastruktur. Namun, PMA juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti ketergantungan pada investasi eksternal dan dampak terhadap pasar domestik. Bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran PMA dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh negara penerima investasi, serta dampaknya terhadap

penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur.

6.5.1. Peran PMA dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

PMA sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara penerima investasi. Salah satu kontribusi utama dari PMA adalah peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi melalui aliran teknologi dan pengetahuan manajerial yang dibawa oleh investor asing (Chenery, 2019). Negara-negara berkembang yang menerima PMA sering kali memperoleh keuntungan dalam bentuk transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang mendukung sektor-sektor produktif mereka.

PMA juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor dengan membuka akses ke pasar internasional bagi produk yang diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi di negara tersebut. Selain itu, PMA dapat mempercepat diversifikasi ekonomi, yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional, seperti pertanian atau ekstraksi sumber daya alam,

dengan mengembangkan sektor industri dan manufaktur yang lebih bernilai tambah (UNCTAD, 2020). Oleh karena itu, PMA berfungsi sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di negara berkembang.

6.5.2.Keuntungan dan Tantangan dari PMA

1. Keuntungan dari PMA

PMA sering kali menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam sektor manufaktur, konstruksi, maupun sektor-sektor terkait lainnya. Pma membawa serta modal dan teknologi yang memungkinkan produksi lebih efisien, yang pada gilirannya dapat menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan asing sering kali mendirikan fasilitas pelatihan dan pengembangan untuk tenaga kerja lokal, yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja di negara penerima (Blomström & Kokko, 1998). PMA juga membawa manfaat dalam hal pembangunan infrastruktur. Banyak

perusahaan asing yang berinvestasi di sektor-sektor infrastruktur seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang lebih baik akan memperkuat daya saing negara dan meningkatkan konektivitas dengan pasar global (Dollar & Kraay, 2004). PMA dapat mengarah pada peningkatan aliran modal ke negara penerima, yang sangat dibutuhkan untuk mendanai proyek-proyek besar dan membiayai pembangunan ekonomi. Selain itu, PMA dapat memperkenalkan standar dan praktik manajerial yang lebih baik, yang memungkinkan perusahaan domestik untuk belajar dan berkembang melalui interaksi langsung dengan investor asing.

2. Tantangan dari PMA

Ketergantungan yang berlebihan pada PMA dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi jika terjadi penarikan modal besar-besaran atau jika kondisi ekonomi global tidak mendukung (Rodrik, 2018). Negara yang terlalu bergantung pada PMA dapat

menghadapi risiko kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global dan kebijakan ekonomi negara asal investor. Tantangan lainnya adalah adanya kemungkinan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat dari PMA. PMA dapat berfokus pada sektor-sektor tertentu yang lebih menguntungkan, sementara sektor-sektor lainnya, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat tertinggal. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dalam negara penerima (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016). Selain itu, PMA yang terlalu besar pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan minyak, dapat merusak lingkungan dan mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

6.5.3. Dampak terhadap Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Infrastruktur

1. Penciptaan Lapangan Kerja

Perusahaan asing yang berinvestasi di negara berkembang sering kali membuka pabrik atau fasilitas manufaktur yang membutuhkan tenaga kerja lokal. Selain itu,

perusahaan asing juga memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja, yang meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja domestik. Penciptaan lapangan kerja ini tidak hanya terjadi di sektor formal, tetapi juga dalam sektor-sektor terkait, seperti layanan logistik, distribusi, dan pemasaran (Blomström & Kokko, 1998). Meskipun demikian, dampak positif ini tidak selalu merata. Sektor-sektor tertentu, seperti industri berat atau manufaktur, cenderung menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak daripada sektor teknologi tinggi atau jasa. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung inklusivitas dalam distribusi manfaat dari PMA sangat penting untuk memastikan bahwa lapangan kerja yang tercipta dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

2. Pengembangan Infrastruktur

Perusahaan asing yang berinvestasi di sektor-sektor seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi sering kali membawa serta investasi besar untuk

membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan operasional mereka. Infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan energi, memperkuat daya saing ekonomi dan menciptakan keuntungan jangka panjang bagi negara penerima investasi (Dollar & Kraay, 2004). Selain itu, infrastruktur yang lebih baik juga dapat menarik lebih banyak investasi di masa depan, karena negara dengan infrastruktur yang kuat lebih mampu menghubungkan pasar domestiknya dengan pasar internasional. Oleh karena itu, PMA yang diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dapat membawa dampak yang sangat positif dalam meningkatkan daya saing ekonomi negara penerima.

6.6. Kesimpulan

Globalisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dengan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan mempercepat inovasi teknologi. Melalui integrasi ekonomi yang lebih dalam, globalisasi telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional,

mempermudah akses terhadap pasar global, dan memungkinkan aliran modal yang lebih besar antara negara-negara berkembang dan maju. Dalam konteks ini, globalisasi telah membantu negara-negara berkembang untuk mengakses teknologi baru, memperkenalkan inovasi dalam produksi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak bagian dunia (IMF, 2021).

Namun, meskipun ada banyak manfaat, globalisasi juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal ketimpangan pendapatan dan dampak lingkungan. Globalisasi cenderung menguntungkan negara-negara maju yang lebih terintegrasi dengan pasar global dan memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan kapital. Di sisi lain, negara berkembang sering kali terperangkap dalam siklus ketergantungan terhadap negara maju, dengan pola perdagangan yang lebih menguntungkan negara-negara maju, dan kehilangan daya saing di sektor-sektor tertentu (Piketty, 2014).

Selain itu, dampak lingkungan dari globalisasi, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan polusi yang meningkat, juga menjadi perhatian utama. Peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan kerusakan ekosistem sering kali terjadi sebagai

akibat dari ekspansi industri yang didorong oleh perdagangan internasional. Oleh karena itu, globalisasi tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga tantangan besar dalam hal keberlanjutan lingkungan (Stern, 2007).

Masa depan globalisasi dan ekonomi dunia akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, dinamika politik, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dalam proyeksi jangka panjang, globalisasi diperkirakan akan terus berlanjut, namun dengan perubahan signifikan dalam cara negara-negara berinteraksi dan mengelola perdagangan serta investasi internasional.

1. Peran Teknologi dan Digitalisasi. Teknologi digital akan semakin memainkan peran penting dalam globalisasi, dengan meningkatnya transaksi *e-commerce*, penggunaan teknologi berbasis data besar (*big data*), dan sistem keuangan digital. Platform digital memungkinkan negara-negara berkembang untuk terlibat dalam perdagangan global tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik yang mahal. Digitalisasi juga dapat mengurangi hambatan geografis dan membuka peluang baru bagi bisnis kecil dan menengah di negara

berkembang untuk memasuki pasar global (OECD, 2020).

2. Multipolaritas Ekonomi. Secara geopolitik, masa depan globalisasi mungkin akan bergerak menuju dunia yang lebih multipolar, dengan kekuatan ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Negara-negara seperti China, India, dan kawasan Asia Tenggara akan memainkan peran yang semakin besar dalam ekonomi global. Globalisasi tidak hanya akan didorong oleh negara-negara Barat, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi baru yang muncul di berbagai belahan dunia, menciptakan dinamika ekonomi yang lebih kompleks dan saling bergantung.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

7.1. Peran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam sistem perekonomian modern, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur (regulator), tetapi juga sebagai pelaku ekonomi, penyedia layanan publik, dan penjaga stabilitas makroekonomi.

1. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah menetapkan aturan main dalam perekonomian melalui kebijakan, peraturan, dan undang-undang untuk memastikan pasar berjalan secara efisien dan adil. Peran ini mencakup:

- a. Menjaga persaingan sehat di pasar.
- b. Mencegah praktik monopoli dan oligopoli.
- c. Melindungi hak konsumen dan pekerja.

- d. Menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.
2. Pemerintah sebagai Fasilitator
Pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan iklim usaha yang kondusif:
 - a. Membangun infrastruktur fisik (jalan, listrik, internet).
 - b. Menyediakan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
 - c. Menyediakan insentif investasi dan kemudahan berusaha.
 - d. Mempercepat proses perizinan dan reformasi birokrasi.
 3. Pemerintah sebagai Investor dan Pelaku Ekonomi
Dalam kondisi tertentu, pemerintah berperan aktif dalam sektor ekonomi, seperti:
 - a. Mendirikan BUMN untuk sektor strategis.
 - b. Melakukan investasi publik di sektor prioritas.
 - c. Memberikan subsidi atau stimulus untuk mendorong sektor tertentu, terutama di masa krisis (misalnya program PEN selama pandemi COVID-19).

4. Pemerintah sebagai Penjaga Stabilitas Makroekonomi

Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan berlangsung dalam jangka panjang melalui:

- a. Kebijakan fiskal: mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
- b. Kebijakan moneter (bekerja sama dengan bank sentral): mengendalikan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar.
- c. Menjaga defisit anggaran dan rasio utang pada tingkat yang aman.

7.2. Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah

Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas neraca pembayaran. Kebijakan ini terbagi ke dalam tiga jenis utama: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor riil.

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Pemerintah

menggunakan instrumen seperti pajak, belanja negara, subsidi, dan transfer.

Tujuan kebijakan fiskal:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Mengurangi ketimpangan sosial.
- d. Menjaga defisit dan utang negara pada tingkat yang terkendali.

Contoh: Program stimulus fiskal saat pandemi COVID-19 (misalnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN) adalah bentuk kebijakan fiskal ekspansif.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral (di Indonesia: Bank Indonesia) untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga.

Tujuan kebijakan moneter:

- a. Menjaga stabilitas harga (inflasi).
- b. Menstabilkan nilai tukar rupiah.
- c. Menjaga kestabilan sistem keuangan.
- d. Instrumen utama:
- e. Suku bunga acuan (BI-Rate/BI 7-Day Reverse Repo Rate).
- f. Operasi pasar terbuka (pembelian/penjualan surat berharga).

- g. Rasio cadangan wajib minimum (GWM).
3. Kebijakan Sektor Riil Kebijakan ini menyoar sektor-sektor produktif seperti industri, pertanian, UMKM, dan perdagangan, guna meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Bentuk kebijakannya antara lain:

- a. Pemberian insentif dan kemudahan berusaha.
- b. Peningkatan keterampilan tenaga kerja (vocational training).
- c. Dukungan terhadap hilirisasi industri dan ekspor.
- d. Penguatan ekonomi digital dan ekonomi hijau.
- e. Sinergi Kebijakan

Agar efektif, ketiga jenis kebijakan ini perlu disinergikan. Misalnya, kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi energi akan berdampak lebih besar jika didukung oleh kebijakan moneter yang menjaga stabilitas harga, serta kebijakan sektor riil yang mendorong produktivitas.

7.3. Peran Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut mencakup fungsi pengatur (regulator), fasilitator, pelaku ekonomi, serta pemelihara stabilitas makroekonomi. Seiring dengan tantangan global dan domestik, pemerintah terus mengembangkan kebijakan yang adaptif dan inklusif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

1. Melalui Investasi Infrastruktur

Pemerintah berinvestasi besar dalam pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas dan produktivitas nasional. Contoh konkret adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital seperti proyek Palapa Ring.

Dampak:

- a. Meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi.
- b. Menarik investasi domestik dan asing.
- c. Mendorong pertumbuhan wilayah di luar Pulau Jawa.

2. Melalui Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemerintah bersama Bank Indonesia menjalankan kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Contoh:

- a. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon terhadap pandemi COVID-19.
 - b. Pemberian insentif pajak dan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
 - c. Dukungan pembiayaan terhadap UMKM dan koperasi.
3. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Digital
- UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi untuk mendorong transformasi UMKM.

Contoh:

- a. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - b. Digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI).
 - c. Dukungan terhadap startup dan ekonomi kreatif.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Melalui program pendidikan, pelatihan vokasi, dan jaminan kesehatan, pemerintah berupaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan sehat.

Contoh:

- a. Program Kartu Prakerja.
 - b. Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah.
 - c. Penguatan program jaminan sosial dan BPJS.
5. Reformasi Struktural dan Deregulasi

Pemerintah meluncurkan berbagai reformasi untuk meningkatkan iklim investasi dan efisiensi birokrasi.

Contoh:

- a. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
- b. Sistem OSS (Online Single Submission) untuk perizinan usaha.
- c. Reformasi perpajakan dan digitalisasi layanan publik.

7.4. Tantangan dan Strategi Pemerintah ke Depan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Dalam menghadapi dinamika global dan domestik yang terus berkembang, pemerintah Indonesia perlu terus mengadaptasi kebijakan dan strategi untuk

menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia, serta strategi untuk mengatasinya, dijabarkan berikut:

1. Tantangan

- a. Ketidakpastian Ekonomi Global

Gejolak geopolitik, perubahan suku bunga global, serta ketegangan perdagangan internasional menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik.

- b. Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah lain seperti Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan dan Sulawesi mengalami ketertinggalan dalam infrastruktur dan investasi.

- c. Pengangguran dan Kualitas SDM

Tingginya angka pengangguran muda dan mismatch antara kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja masih menjadi persoalan krusial.

- d. Perubahan Iklim dan Ketahanan Lingkungan

Bencana alam dan risiko perubahan iklim mengancam ketahanan ekonomi dan memerlukan transisi menuju ekonomi hijau.

- e. Transformasi Digital dan Disrupsi Teknologi
Adopsi teknologi digital yang belum merata menimbulkan kesenjangan digital, terutama di daerah pedesaan dan UMKM.

2. Strategi Pemerintah ke Depan

- a. Mendorong Transformasi Ekonomi Hijau
Pemerintah berfokus pada pembangunan berkelanjutan melalui:
 - Investasi pada energi terbarukan.
 - Program rehabilitasi lingkungan.
 - Insentif pajak hijau dan perdagangan karbon.
- b. Penguatan Kualitas SDM
Melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan digital, kewirausahaan, dan industri 4.0.
- c. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kawasan
Melanjutkan pembangunan ibu kota negara (IKN), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.
- d. Peningkatan Daya Saing Investasi

Melalui penyederhanaan regulasi, reformasi perpajakan, sistem OSS berbasis risiko, dan percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

e. Peningkatan Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola

Fokus pada belanja produktif, penguatan digitalisasi APBN/APBD, serta pengendalian utang yang sehat.

f. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Digital
Transformasi UMKM ke ekosistem digital dan penguatan sektor informal agar naik kelas menjadi bagian dari rantai nilai nasional dan global.

BAB VIII

SEKTOR EKONOMI UTAMA

8.1. Definisi dan Klasifikasi Sektor Ekonomi

8.1.1. Definisi Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah pengelompokan aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan dan kontribusinya terhadap proses produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa. Konsep ini digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi suatu negara, menilai kontribusi tiap sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyusun kebijakan pembangunan ekonomi.

Pembagian sektor ekonomi dapat dilihat dari dua perspektif utama:

1. Berdasarkan jenis aktivitas atau lapangan usaha
2. Berdasarkan tahap proses produksi (klasifikasi tradisional)

8.1.2. Klasifikasi Sektor Ekonomi

1. Klasifikasi Tradisional (berdasarkan proses produksi):

- a. Sektor Primer
Kegiatan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam secara langsung.
Contoh: pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan.
- b. Sektor Sekunder
Kegiatan ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Contoh: industri pengolahan, manufaktur, dan konstruksi.
- c. Sektor Tersier
Kegiatan yang memberikan jasa kepada masyarakat atau dunia usaha.
Contoh: perdagangan, transportasi, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan.
- d. Sektor Kuarter (*opsional*)
Kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi.
Contoh: riset, konsultasi, teknologi informasi.
- e. Sektor Kuiner (*opsional*)
Layanan sosial dan administratif, biasanya disediakan oleh pemerintah atau organisasi non-profit.

Contoh: administrasi publik, lembaga sosial, pelayanan masyarakat.

2. Klasifikasi Modern (berdasarkan lapangan usaha menurut BPS):

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia dibagi ke dalam 17 lapangan usaha, seperti:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Konstruksi
- e. Perdagangan Besar dan Eceran
- f. Transportasi dan Pergudangan
- g. Informasi dan Komunikasi
- h. Jasa Pendidikan
- i. Jasa Kesehatan, dsb.

Klasifikasi ini digunakan untuk menyusun statistik makroekonomi seperti PDB, lapangan kerja, dan investasi.

8.2. Sektor Primer

8.2.1. Pengertian Sektor Primer

Sektor primer adalah salah satu dari tiga sektor utama dalam struktur ekonomi, yang berfokus pada eksploitasi langsung sumber daya

alam. Kegiatan dalam sektor ini merupakan fondasi awal dalam rantai ekonomi karena menghasilkan bahan mentah yang digunakan oleh sektor sekunder untuk diolah lebih lanjut.

8.2.2. Cakupan Sektor Primer

1. Pertanian

Kegiatan ini mencakup produksi tanaman pangan (padi, jagung), hortikultura, perkebunan (kelapa sawit, teh, karet), dan peternakan. Di Indonesia, pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena menyerap tenaga kerja terbesar, terutama di pedesaan.

2. Perikanan

Meliputi penangkapan ikan di laut dan budidaya perikanan di darat (tambak, kolam). Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya laut (akuakultur).

3. Kehutanan

Kehutanan mencakup pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu. Hutan Indonesia memiliki peran vital sebagai

penyeimbang iklim dan sumber ekonomi, namun juga menghadapi ancaman deforestasi dan degradasi.

4. Pertambangan

Mencakup kegiatan ekstraksi mineral dan sumber daya energi seperti batu bara, emas, nikel, dan minyak bumi. Pertambangan memiliki kontribusi besar dalam PDB dan ekspor nasional, serta menjadi sektor kunci dalam strategi hilirisasi pemerintah.

Peran Strategis Sektor Primer dalam Ekonomi

- Penyedia Bahan Baku: Hasil dari sektor primer menjadi input utama untuk sektor industri dan pengolahan.
- Kontributor PDB dan Ekspor: Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan hasil laut menyumbang besar terhadap devisa negara.
- Sumber Lapangan Kerja: Terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
- Pendorong Pembangunan Wilayah: Kegiatan sektor primer seringkali menjadi motor awal pembangunan di daerah.

8.3. Sektor Sekunder

8.3.1. Pengertian Sektor Sekunder

Sektor sekunder merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah tersebut umumnya berasal dari sektor primer, dan sektor sekunder memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu produk.

8.3.2. Cakupan Kegiatan Sektor Sekunder

1. Industri Pengolahan (Manufaktur)

Merupakan kegiatan industri yang mengubah bahan mentah menjadi produk siap pakai. Contohnya:

- Pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng.
- Produksi tekstil dan pakaian jadi.
- Industri makanan dan minuman.
- Industri kimia dan farmasi.
- Industri otomotif dan elektronik.

2. Konstruksi

Konstruksi meliputi pembangunan infrastruktur fisik seperti:

- Bangunan gedung (perumahan, sekolah, rumah sakit).
- Infrastruktur publik (jalan, jembatan, pelabuhan).
- Proyek energi (PLTU, PLTA, PLTS, dsb).

8.3.3. Peran Sektor Sekunder dalam Ekonomi

1. Peningkatan Nilai Tambah: Mengolah hasil sektor primer menjadi produk bernilai tinggi.
2. Menyerap Tenaga Kerja: Industri pengolahan dan konstruksi merupakan penyerap tenaga kerja besar, terutama di kota.
3. Pendorong Urbanisasi dan Perkotaan: Pusat-pusat industri berkembang menjadi kota-kota industri.
4. Meningkatkan Ekspor: Barang hasil industri (misalnya tekstil, elektronik, makanan olahan) menjadi komoditas ekspor unggulan.
5. Mendorong Inovasi dan Teknologi: Sektor ini menjadi pusat penelitian dan pengembangan (R&D).

8.4. Sektor Tersier

8.4.1. Pengertian Sektor Tersier

Sektor tersier adalah sektor ekonomi yang tidak menghasilkan barang secara langsung, melainkan menyediakan jasa atau layanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Sektor ini berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di sektor primer dan sekunder.

8.4.2. Cakupan Kegiatan Sektor Tersier

1. Perdagangan

Termasuk aktivitas jual beli barang, baik dalam skala kecil (ritel) maupun besar (grosir). Perdagangan bisa dilakukan secara fisik (pasar tradisional, toko modern) maupun daring (e-commerce).

2. Transportasi dan Logistik

Mencakup semua moda transportasi—darat, laut, udara—dan kegiatan pendukung seperti pergudangan, distribusi, dan pengiriman barang. Sektor ini vital dalam mendistribusikan hasil produksi ke pasar.

3. Jasa Keuangan

Meliputi perbankan, asuransi, investasi, dan fintech. Jasa keuangan membantu aliran modal, investasi, dan pengelolaan risiko.

4. Pariwisata dan Perhotelan

Berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa melalui layanan wisata, akomodasi, makanan dan minuman.

5. Jasa Profesional

Termasuk layanan hukum, pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, dan konsultasi.

Peran Strategis Sektor Tersier

- Mendukung Produktivitas Sektor Lain: Menyediakan sarana distribusi, keuangan, dan komunikasi.
- Sumber Pertumbuhan Ekonomi Modern: Dalam ekonomi maju, sektor tersier menyumbang porsi terbesar PDB.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Layanan publik dan jasa profesional meningkatkan kualitas hidup.
- Penyerap Tenaga Kerja Terampil: Banyak posisi memerlukan pendidikan dan keahlian tertentu.

8.5. Sektor Kuartener dan Kuinener

Meskipun dalam klasifikasi klasik sektor ekonomi hanya dikenal tiga sektor utama (primer, sekunder, tersier), seiring dengan perkembangan ekonomi modern dan ekonomi berbasis pengetahuan, muncul pembagian lanjutan yaitu sektor kuartener dan sektor kuinener.

1. Sektor Kuartener (Quaternary Sector)

Sektor kuartener adalah sektor ekonomi yang berfokus pada pengetahuan, informasi, dan teknologi, terutama dalam hal pengelolaan, distribusi, dan pemrosesan data atau informasi. Sektor ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Contoh Kegiatan:

- Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Penelitian dan pengembangan (R&D)
- Jasa pendidikan tinggi
- Konsultan teknologi dan data
- Pengelolaan big data dan cloud computing

Ciri-Ciri:

- Membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi
- Mengandalkan kreativitas, inovasi, dan digitalisasi
- Sering dikaitkan dengan ekonomi digital dan pengetahuan (knowledge economy)

Peran Strategis:

- Mendorong inovasi lintas sektor
- Menghasilkan teknologi baru dan efisiensi ekonomi
- Menjadi motor penggerak transformasi industri 4.0

2. Sektor Kuinener (Quinary Sector)

Sektor kuinener adalah sektor yang melibatkan pengambilan keputusan tingkat tinggi dan layanan kemanusiaan. Biasanya, sektor ini mencakup individu dengan peran strategis dalam pemerintahan, organisasi, atau perusahaan besar.

Contoh Kegiatan:

- Eksekutif perusahaan besar (CEO, direktur)
- Pejabat tinggi pemerintahan dan kebijakan publik
- Peneliti utama dan pemimpin inovasi

- Tokoh pendidikan dan kesehatan dengan pengaruh strategis
- Aktivitas filantropi dan sosial pada tingkat kebijakan

Ciri-Ciri:

- Menekankan pada pengambilan keputusan strategis dan kepemimpinan
- Biasa ditemukan dalam struktur organisasi tingkat tinggi
- Mempunyai pengaruh luas terhadap arah pembangunan ekonomi dan sosial

Peran Strategis:

- Menentukan arah kebijakan ekonomi dan sosial
- Mempengaruhi budaya organisasi, inovasi, dan etika bisnis
- Mengintegrasikan pengetahuan, moral, dan kepemimpinan

8.6. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDB

8.6.1. Pengertian PDB

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). PDB menjadi indikator utama untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara.

Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB menunjukkan seberapa besar peran masing-masing sektor dalam membentuk total output ekonomi nasional.

8.6.2. Kontribusi Menurut Sektor Ekonomi

1. Sektor Primer (Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Pertambangan)
 - Sektor ini penting di negara berkembang, terutama pada tahap awal pembangunan.
 - Di Indonesia, sektor ini menyumbang sekitar 12–14% terhadap PDB (BPS, 2023).
 - Meskipun kontribusinya menurun, sektor ini masih dominan dalam penyediaan lapangan kerja, khususnya di wilayah pedesaan.
2. Sektor Sekunder (Industri Pengolahan dan Konstruksi)
 - Industri pengolahan merupakan penyumbang PDB terbesar, sekitar 18–20%.

- Konstruksi berkontribusi sekitar 10%, dan menjadi indikator penting pembangunan infrastruktur.
 - Industri pengolahan juga berperan besar dalam ekspor dan industrialisasi nasional.
3. Sektor Tersier (Perdagangan, Transportasi, Jasa Keuangan, Pendidikan, Kesehatan)
- Sektor ini terus berkembang seiring dengan urbanisasi dan pertumbuhan kelas menengah.
 - Perdagangan dan reparasi menyumbang lebih dari 13% terhadap PDB.
 - Jasa keuangan, informasi dan komunikasi juga terus tumbuh, khususnya pasca-pandemi dan seiring dengan digitalisasi.
4. Sektor Kuartir dan Kuiner (Teknologi, Riset, Pemerintahan)
- Sektor ini tidak selalu dipisahkan dalam statistik PDB, namun aktivitas berbasis pengetahuan (seperti TIK) berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

- Pemerintah dan jasa pendidikan/kesehatan publik tetap menjadi penyumbang stabil dalam PDB nasional.
5. Tren Kontribusi Sektor (Indonesia)
- Perubahan struktur ekonomi menunjukkan pergeseran dari sektor primer ke tersier.
 - Sektor industri dan jasa mendominasi PDB, sementara sektor pertanian menurun secara relatif.
 - Transformasi digital dan kebijakan hilirisasi industri memberi dampak pada peningkatan sektor pengolahan dan jasa berbasis teknologi.

BAB IX

PERAN TEKNOLOGI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Hampir di semua negara maju dan berkembang Teknologi saat sekarang ini sangat berpengaruh sekali terhadap usaha pembangunan ekonomi. Apalagi menghadapi zaman digital sekarang ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan bantuan teknologi. Dengan adanya teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif sekali. Sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan khususnya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Sehingga sangat bermanfaat sekali dampaknya dengan bantuan teknologi ini di Indonesia. Sehingga dengan bantuan teknologi ini mempermudah dan mendapatkan hasil produksi yang meningkat dan pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap pembangunan ekonomi di negara maju dan berkembang.

5 (lima) faktor Bagaimana teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi.

9.1. Industri Baru

Industri baru: Teknologi menciptakan industri dan produk baru, seperti e-commerce, yang telah mengubah ritel.

Dalam dekade terakhir, e-commerce dan perkembangan teknologi telah mengubah cara konsumen berbelanja secara signifikan. Dari kemudahan berbelanja hanya dengan beberapa kali klik hingga pengalaman yang lebih personal dan interaktif, teknologi digital telah menciptakan lanskap baru dalam industri ritel. Meningkatnya akses internet, penggunaan smartphone yang semakin luas, dan teknologi yang terus berkembang telah mendorong pertumbuhan pesat e-commerce, memberikan dampak besar terhadap pola konsumsi dan kebiasaan belanja konsumen di seluruh dunia.

1. Kenyamanan dan Aksesibilitas yang Tak Tertandingi

Salah satu keunggulan utama e-commerce adalah kenyamanan yang ditawarkannya kepada konsumen. Dengan toko online yang tersedia 24/7, konsumen dapat berbelanja kapan saja dan dari mana saja, tanpa perlu mendatangi toko fisik. Bahkan di tengah malam atau saat hari libur, konsumen tetap bisa

mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Kemudahan ini sangat berperan dalam mengubah pola perilaku konsumen, yang kini lebih mengutamakan kenyamanan dalam berbelanja. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada di Indonesia, misalnya, telah menjadi tempat belanja utama bagi banyak orang. Tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyediakan berbagai pilihan produk mulai dari pakaian, barang elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga. Aksesibilitas ini memberikan konsumen lebih banyak pilihan tanpa batasan jarak dan waktu.

2. Personalisasi dengan Teknologi Data dan Kecerdasan Buatan

Salah satu alasan mengapa e-commerce begitu sukses adalah kemampuannya dalam memahami perilaku konsumen. Dengan bantuan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI), platform e-commerce dapat menganalisis pola pembelian, preferensi, dan minat konsumen. Informasi ini kemudian digunakan untuk menawarkan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat pengguna, menciptakan pengalaman berbelanja

yang lebih personal. Contohnya, ketika konsumen sering mencari produk fashion, mereka akan mendapatkan rekomendasi produk terkait fashion di beranda e-commerce mereka. Teknologi ini membantu konsumen menemukan produk yang relevan lebih cepat, serta meningkatkan kepuasan dalam berbelanja.

3. Pembayaran Digital dan Keamanan yang Semakin Meningkat

Perkembangan teknologi pembayaran digital juga turut mendukung transformasi e-commerce. Konsumen kini dapat memilih berbagai metode pembayaran digital yang aman dan cepat, seperti dompet digital (e-wallet) GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay, serta transfer bank online. Dengan opsi ini, transaksi menjadi lebih praktis dan aman, menghilangkan kebutuhan akan uang tunai dan memudahkan transaksi lintas batas. Keamanan juga menjadi prioritas utama dalam industri e-commerce. Teknologi enkripsi data, verifikasi dua langkah, dan metode keamanan lainnya membantu melindungi informasi pribadi konsumen saat bertransaksi. Dengan demikian, konsumen

merasa lebih percaya diri dan nyaman saat melakukan pembelian online.

4. Pengalaman Berbelanja yang Interaktif dan Imersif

Teknologi realitas tertambah (AR) dan realitas virtual (VR) telah memperkaya pengalaman belanja online dengan membuatnya lebih interaktif. Beberapa platform e-commerce kini memungkinkan konsumen untuk “mencoba” produk secara virtual, misalnya mencoba warna lipstik atau menempatkan perabotan dalam ruangan melalui teknologi AR. Ini membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih informasional dan meminimalkan risiko ketidakcocokan produk. Selain itu, konsep “live shopping” juga menjadi tren baru dalam e-commerce, di mana konsumen dapat menonton siaran langsung penjual atau influencer yang menunjukkan produk secara langsung, berinteraksi dengan mereka, dan bahkan membeli produk saat itu juga. Fitur ini menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan membawa elemen sosial ke dalam pengalaman belanja online.

5. Perubahan Perilaku Konsumen di Masa Depan

Dengan semakin berkembangnya teknologi, e-commerce diperkirakan akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan konsumen. Konsumen masa kini sudah mulai terbiasa dengan fleksibilitas, kenyamanan, dan kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce, sehingga perilaku belanja tradisional pun ikut berubah. Ke depan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan yang lebih canggih, integrasi blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi, hingga personalisasi yang lebih mendalam akan semakin mempengaruhi pengalaman belanja online. Konsumen mungkin akan menikmati pengalaman belanja yang semakin personal, cepat, dan aman dengan dukungan teknologi yang terus berkembang.

9.2. Peningkatan Efisiensi

Peningkatan efisiensi : Teknologi meningkatkan efisiensi dalam dunia industri

Faktor efisiensi dalam peningkatan perekonomian mencakup penggunaan sumber daya produktif secara optimal, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Efisiensi yang tinggi memungkinkan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya lebih rendah, meningkatkan

kualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih juga berperan penting, karena kemampuan mereka dalam menghasilkan produk yang berkualitas dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, penggunaan teknologi yang efisien mendukung pengurangan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.

9.3. Inovasi

Inovasi: Teknologi baru mendorong inovasi, yang mendorong pertumbuhan.

Inovasi teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi mikroekonomi di era digital. Dengan adanya teknologi, banyak proses bisnis yang dulunya memakan waktu dan mahal kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan hemat biaya. Misalnya, aplikasi pembayaran digital memudahkan transaksi jual beli dan menekan biaya transaksi. Selain itu, Teknologi memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih besar dengan biaya lebih rendah. Oleh karena itu, inovasi teknologi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Era digital saat ini ditandai dengan kemajuan

teknologi yang pesat. Teknologi kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis, sekarang. Dalam konteks mikroekonomi, inovasi teknologi dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi efisiensi. Efisiensi mikroekonomi adalah kemampuan pelaku ekonomi untuk membuat produk dan jasa dengan biaya produksi terendah. Dengan adanya inovasi teknologi, banyak proses bisnis yang sebelumnya membutuhkan banyak sumber daya kini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Misalnya, penggunaan robot dalam produksi akan meningkatkan kecepatan produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Dengan cara ini, inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan.

Transformasi digital sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap di berbagai ekonomi industri, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan sudah mendorong munculnya model dan peluang bisnis baru. Inovasi bisnis berperan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di era digital.

Transformasi digital memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai industri, termasuk UMKM, sehingga memudahkan munculnya model dan peluang bisnis baru. Platform e-commerce membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Survei yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa mayoritas UMKM menerima e-commerce dan menyadari pentingnya e-commerce dalam pengembangan bisnis. Pergantian e-commerce dapat bergantung pada faktor-faktor seperti sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Dengan menggabungkan teknik pemasaran, teknis promosi offline dan online dapat menjadi strategi bertahan melanjutkan hidup yang efektif bagi UMKM. UMKM bisa mendapatkan keuntungan dari strategi pemasaran digital seperti membuat akun bisnis Google, mempromosikan produk melalui media social (seperti shopee, tiktok dll), bisa berkolaborasi dengan influencer, dan menggunakan email marketing (Lestari, 2022). Strategi-strategi tersebut akan membantu UMKM meningkatkan target pasar mereka, dengan cara menurunkan biaya pemasaran, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan (Lestari, 2022). Meningkatkan pengetahuan, kapabilitas, dan keterampilan pemangku kepentingan UMKM sangat

penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja. UMKM perlu berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membantu karyawannya beradaptasi dengan era digital. UMKM perlu fokus pada pengembangan produk, proses, dan strategi pemasaran baru agar tetap kompetitif di era digital.

Inovasi membantu perusahaan membuat terobosan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Alat Sumber daya manusia digital dapat membantu bisnis menjadi lebih kompetitif dengan menyederhanakan manajemen talenta dan meningkatkan efisiensi operasional (Degtyareva, 2021). Menerapkan alat sumber daya manusia digital meningkatkan pengalaman karyawan dan meningkatkan proses bisnis. UMKM dapat tumbuh lebih cepat dengan berpartisipasi dalam ekonomi digital dan memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, media sosial, dan platform seluler dalam operasional bisnis mereka (Lestari, 2022). Pertumbuhan ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Langkah pemerintah dalam mendukung transformasi digital dapat secara aktif mendorong para pelaku industri kreatif untuk meningkatkan inovasi,

akses pasar dan efisiensi. Tetapi, penting juga bagi pemerintah untuk selalu mempertimbangkan risiko dan dampak transformasi digital dan memberikan dukungan yang tepat untuk membantu perusahaan kreatif memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dilalui. Tetapi, transformasi digital juga membawa tantangan yang signifikan, seperti risiko, kurangnya akses dan keahlian digital di beberapa wilayah, keamanan siber serta permasalahan peraturan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini, yaitu :

1. Menjalinkan kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif.
2. Mendorong sinergi dan kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur digital yang andal dan aman, serta memperkuat upaya untuk meningkatkan literasi digital dan sosial. Ranah kreatif para pelaku ekonomi.
3. Menerapkan insentif untuk memberikan dukungan finansial kepada pelaku industri kreatif dalam bentuk pinjaman modal atau bunga rendah.

4. Memperkuat pengembangan klaster kreatif dan hubungan antar pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan akses pasar.
5. Memperkuat kontrol dan pengawasan terkait keamanan siber, perlindungan hak cipta, dan regulasi terkait lainnya untuk mendukung pengembangan industri kreatif.

Selain itu, start-up dan perusahaan kreatif akan diberi keringanan pajak. Ini memungkinkan perusahaan untuk bisa berinvestasi dan beroperasi di industri kreatif dengan beban pajak yang lebih rendah. Kajian dalam hal dampak teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi telah lama di laksanakan, dan penting supaya kita tahu bahwa dampak teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangatlah penting. Menurut Donou-Adonsou (2017), lebih dari sekedar peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi yang sukses dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sumber daya manusia yang lebih baik sebagai alat produksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi dapat memprediksi aliran produksi yang terdiri dari investasi, perdagangan, dan produksi. Karena hampir tidak mungkin bagi suatu

negara untuk memenuhi kebutuhan teknologinya sendiri, kemajuan teknologi mendorong perdagangan internasional dan investasi asing. Selain itu, kemajuan teknologi dapat membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Selain itu, Romer, pendiri teori ekonomi endogen, berpendapat bahwa arus teknologi dapat mendorong pertumbuhan modal dan investasi. Kemajuan teknologi memengaruhi pertukaran budaya, terutama pertumbuhan ekonomi, selain investasi. Tidak diragukan lagi, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi harus mendukung pendidikan yang berbasis teknologi kontemporer agar dapat digunakan, secara efektif dan efisien dalam proses produksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pretner (2013), Teknologi dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2011), selain modal dan tenaga kerja, teknologi merupakan komponen ketiga yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan kemajuan teknologi, suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakatnya dengan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih baik. Teknologi juga memungkinkan negara tersebut menghasilkan barang dan jasa tersebut dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Teknologi memengaruhi ekonomi dengan

meningkatkan produktivitas, yang berarti peningkatan output; peningkatan kualitas produk, ketersediaan produk baru, dan inovasi terbaru. Kemajuan teknologi, bukan pendidikan, menurut Robert Solow (dalam Sadano Sukirno 2015). Perubahan dalam proses produksi secara teratur dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Karena teknologi didapat dari modal per pekerja yang efektif, maka peningkatan output per TK dapat dikendalikan oleh pertumbuhan teknologi (Sadano Sukirno 2015).

9.4. Peran Teknologi pada Peningkatan Lapangan Kerja

Ada beberapa hal yang perlu diketahui, mengenai peran teknologi pada peningkatan lapangan kerja yaitu:

1. **Mobilitas Kerja:** TI telah memungkinkan mobilitas kerja yang lebih besar. Dengan adanya perangkat seluler dan akses internet yang mudah, karyawan dapat mengakses informasi dan bekerja dari mana saja. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam waktu dan lokasi kerja, meningkatkan produktivitas dan keseimbangan kerja-hidup.
2. **Pengembangan Profesional:** Teknologi informasi juga menyediakan akses ke berbagai sumber

daya pembelajaran online. Karyawan dapat mengambil kursus online, webinar, atau sumber daya pembelajaran mandiri untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru dalam bidang TI dan domain kerja mereka.

3. Keamanan Informasi: Keamanan informasi menjadi perhatian utama dalam dunia kerja saat ini. TI berperan dalam melindungi data bisnis dan pelanggan dengan menggunakan teknologi enkripsi, firewall, serta sistem deteksi dan respons serangan cyber. Sistem manajemen identitas dan akses juga membantu mengendalikan akses terhadap informasi sensitif.
4. Inovasi dan Transformasi Bisnis: TI telah menjadi katalisator utama untuk inovasi dan transformasi bisnis. Perusahaan yang mengadopsi teknologi informasi dengan baik dapat mengembangkan model bisnis baru, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang baru. Contohnya adalah adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence), Internet of Things (IoT), dan teknologi blockchain.

Secara keseluruhan, Teknologi Informasi telah memainkan peran krusial dalam mengubah cara kerja dan bisnis. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, pemahaman dan pemanfaatan yang efektif terhadap TI akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan organisasi dan profesional.

9.5. Teknologi Mengarah pada Standar Hidup yang Lebih Tinggi

Teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Inovasi di bidang teknologi tidak hanya berperan dalam mempercepat informasi dan komunikasi, tetapi juga dalam mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Teknologi digital, misalnya, membuka akses layanan yang lebih mudah dan efisien, terutama bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Peningkatan kualitas hidup diukur melalui berbagai indikator, Salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan pencapaian di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Suatu hal yang penting, bahwa bagaimana teknologi berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup

masyarakat Indonesia di berbagai bidang, serta tantangan yang perlu diatasi dalam proses ini.

1. Teknologi dan Peningkatan Pendidikan

Teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses pendidikan. Platform pembelajaran daring memungkinkan siswa dan mahasiswa belajar secara fleksibel, tanpa terbatas oleh jarak atau waktu. Selain itu, konten-konten edukatif yang tersedia secara gratis di internet juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh pengetahuan baru. Di daerah-daerah terpencil, teknologi membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur pendidikan dengan menyediakan materi belajar secara daring.

BPS mencatat bahwa angka partisipasi sekolah (APS) di Indonesia semakin meningkat, terutama di kelompok usia 13-15 tahun yang mencapai 96,1% pada 2023. Teknologi pendidikan juga memungkinkan peningkatan kualitas pengajaran melalui berbagai metode interaktif dan kolaboratif. Pemerintah turut memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kurikulum digital dan sistem penilaian yang lebih transparan.

2. Teknologi dalam Bidang Kesehatan

Pemanfaatan teknologi di sektor kesehatan berperan besar dalam meningkatkan akses layanan dan efisiensi penanganan medis. Teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan konsultasi kesehatan secara daring, yang sangat bermanfaat terutama bagi mereka di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas. Selain itu, pemanfaatan data digital dan sistem rekam medis elektronik membantu meningkatkan akurasi dan efektivitas penanganan pasien.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, umur harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia saat lahir mencapai 73,93 tahun pada 2023. Angka tersebut meningkat 0,23 tahun atau 0,31% dibandingkan pada 2022 yang sebesar 73,7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif, melalui pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, kampanye kesehatan dan edukasi pola hidup sehat melalui platform digital turut mendorong peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat.

3. Teknologi dalam Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial

Transformasi digital juga mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan administrasi secara daring, seperti pembuatan KTP, paspor, dan jaminan sosial. Sistem informasi berbasis teknologi juga memungkinkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, dengan memanfaatkan big data dan analitik untuk mengidentifikasi penerima manfaat.

Pemanfaatan teknologi oleh pemerintah turut memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terstruktur, sehingga lebih banyak masyarakat yang terjangkau dan mendapatkan manfaat.

Dengan peran teknologi yang semakin dominan dalam perekonomian dari tahun ke tahun, penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami dampaknya secara menyeluruh. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh transformasi terutama peran teknologi digital,

kolaborasi antara sektor publik dan swasta, investasi dalam infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengarahkan perekonomian menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam era globalisasi sekarang dan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Perekonomian digital mengacu pada integrasi teknologi digital dalam semua aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Dalam konteks ini, peran teknologi menjadi sangat penting, memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan dinamika perekonomian digital.

Penerapan teknologi dalam perekonomian telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Model bisnis tradisional telah digantikan oleh model baru yang berfokus pada layanan digital, fleksibilitas, dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Misalnya, platform digital seperti e-commerce, layanan finansial berbasis aplikasi, dan pasar digital telah mengubah cara konsumen berbelanja, membayar, dan berinvestasi.

BAB X

KETIMPANGAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA

10.1. Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi, yang akhirnya menciptakan jurang pemisah antara kelompok masyarakat kaya dan miskin (Piketty, 2014). Menurut Stiglitz (2012), ketimpangan ekonomi bukan hanya permasalahan keadilan sosial, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung menghadapi permasalahan sosial yang lebih kompleks, seperti tingginya tingkat kriminalitas, rendahnya mobilitas sosial, dan ketidakstabilan politik.

Di banyak negara berkembang, ketimpangan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang tidak inklusif serta sistem distribusi kekayaan yang tidak merata (Todaro & Smith, 2020). Akses terhadap

pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas membuat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus memberikan akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara optimal. Jika ketimpangan terus berlanjut, maka peluang bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi semakin kecil.

Dampak ketimpangan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh stabilitas sosial secara keseluruhan. Wilkinson dan Pickett (2009) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung mengalami masalah kesehatan mental, stres sosial, dan rendahnya kepercayaan antarwarga. Ketimpangan yang tinggi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan merasa tidak memiliki alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Glaeser, 2011). Dengan demikian, ketimpangan ekonomi bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pembentukan struktur sosial suatu negara.

Di sektor ekonomi makro, ketimpangan yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Krugman, 2013). Ketika sebagian besar pendapatan hanya beredar di kelompok tertentu, daya konsumsi masyarakat menurun, yang pada akhirnya berdampak negatif pada produksi dan investasi (Galbraith, 2016). Selain itu, negara dengan kesenjangan ekonomi tinggi cenderung mengalami ketidakstabilan politik, yang berujung pada kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, banyak ekonom menekankan pentingnya kebijakan redistribusi yang adil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu cara mengurangi ketimpangan ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, seperti program subsidi pendidikan, layanan kesehatan gratis, dan akses terhadap modal usaha (Atkinson, 2015). Selain itu, penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dapat menjadi solusi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat (Bourguignon, 2017). Negara-negara yang berhasil mengurangi ketimpangan, seperti Skandinavia, menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan sosial yang kuat dan sistem perpajakan

progresif dapat menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik.

Oleh karena itu, mengatasi ketimpangan ekonomi membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang mencakup aspek kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Seperti yang dikatakan oleh Sen (1999), pembangunan ekonomi yang sukses bukan hanya tentang pertumbuhan angka-angka statistik, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, mengurangi ketimpangan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan bangsa.

10.2. Memahami Lebih Dekat Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena yang terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di suatu masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketimpangan ekonomi didefinisikan sebagai

keadaan yang tidak seimbang dalam distribusi sumber daya ekonomi di antara kelompok masyarakat. Ketimpangan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan kebijakan ekonomi yang kurang inklusif. Dalam konteks global, ketimpangan ekonomi sering kali dikaitkan dengan dampak industrialisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi yang tidak merata (Piketty, 2014).

Para ekonom memiliki berbagai perspektif dalam mendefinisikan ketimpangan ekonomi. Stiglitz (2012) berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tertinggal. Todaro dan Smith (2020) menekankan bahwa ketimpangan ekonomi adalah cerminan dari kebijakan dan struktur sosial yang tidak mendukung kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Sen (1999) melihat ketimpangan sebagai hambatan dalam pembangunan manusia, di mana kelompok masyarakat miskin tidak memiliki kebebasan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu, Wilkinson dan Pickett (2009) menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi berdampak pada kesejahteraan sosial, seperti meningkatnya angka

kriminalitas dan rendahnya kesehatan mental. Krugman (2013) menekankan bahwa kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat menurun. Glaeser (2011) menambahkan bahwa ketimpangan yang tinggi memperlebar kesenjangan sosial dan dapat menyebabkan instabilitas politik. Sementara itu, Atkinson (2015) menekankan pentingnya kebijakan redistribusi untuk mengurangi ketimpangan, seperti sistem perpajakan yang progresif dan kebijakan sosial yang kuat. Bourguignon (2017) melihat bahwa ketimpangan ekonomi di negara berkembang lebih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam akses terhadap modal dan infrastruktur.

Ketimpangan ekonomi tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Berikut adalah beberapa contoh ketimpangan ekonomi di berbagai negara beserta analisisnya:

Tabel 1. Ketimpangan Ekonomi di Berbagai Negara

Negara	Contoh Ketimpangan Ekonomi	Analisis
Amerika Serikat	Konsentrasi kekayaan di tangan 1% penduduk tertinggi (Piketty, 2014)	Sistem perpajakan yang kurang progresif dan gaji pekerja menengah stagnan
Brasil	Ketimpangan pendapatan tinggi antara kota dan pedesaan (Todaro & Smith, 2020)	Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan
Afrika Selatan	Warisan apartheid menyebabkan perbedaan ekonomi rasial yang signifikan (Atkinson, 2015)	Kebijakan afirmatif belum cukup efektif dalam menciptakan kesetaraan
India	Jurang pendapatan antara kelas atas dan bawah semakin lebar (Sen, 1999)	Kuranginya kesempatan kerja formal dan dominasi ekonomi informal
Indonesia	Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Bourguignon, 2017)	Investasi infrastruktur belum merata, memperlambat pertumbuhan ekonomi desa
Inggris	Meningkatnya kesenjangan ekonomi pasca krisis keuangan 2008 (Krugman, 2013)	Kebijakan austerity mengurangi belanja sosial, memperburuk ketimpangan

China	Pertumbuhan ekonomi pesat tetapi kesenjangan desa-kota semakin tinggi (Glaeser, 2011)	Pembangunan terkonsentrasi di daerah industri, sementara daerah pedesaan tertinggal
-------	---	---

Sumber: Analisis terhadap beberapa referensi terkait (2025)

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat mencerminkan bagaimana kebijakan perpajakan dan deregulasi ekonomi memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Menurut Piketty (2014), ketimpangan ini meningkat sejak tahun 1980-an akibat pemotongan pajak untuk kelas atas dan stagnasi upah bagi pekerja menengah. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Brasil, ketimpangan ekonomi terjadi karena perbedaan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Todaro & Smith, 2020). Meskipun negara ini memiliki program sosial seperti Bolsa Familia, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam hal kesempatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial harus disertai dengan investasi yang merata dalam pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi produktif.

Sementara itu, di Afrika Selatan, ketimpangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh warisan apartheid yang membatasi akses kelompok tertentu terhadap sumber daya ekonomi (Atkinson, 2015). Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan afirmatif, tantangan utama tetap ada dalam menciptakan kesempatan ekonomi yang adil bagi seluruh ras dan kelompok sosial. Hal ini membuktikan bahwa sejarah ketimpangan ekonomi dapat berdampak jangka panjang jika tidak diatasi dengan kebijakan yang efektif.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia juga menjadi perhatian, terutama dalam kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Menurut Bourguignon (2017), ketimpangan ini dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap infrastruktur dan modal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan investasi dalam pembangunan desa dan memperluas akses terhadap pendidikan serta sumber daya ekonomi bagi masyarakat di luar kota besar. Dengan demikian, memahami ketimpangan ekonomi secara mendalam dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Ketimpangan bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga berdampak luas

pada aspek sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata.

10.3. Indikator Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi dapat diukur menggunakan berbagai indikator untuk memahami sejauh mana distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara. Salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah Gini Ratio (Koefisien Gini), yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Koefisien ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan maksimal (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu atau kelompok tertentu) (Atkinson, 2015). Dengan menggunakan Koefisien Gini, pemerintah dan ekonom dapat memahami tingkat ketimpangan serta merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.

Pengukuran Koefisien Gini dilakukan dengan membandingkan distribusi pendapatan aktual dengan

distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, menggunakan kurva Lorenz (Todaro & Smith, 2020). Kurva Lorenz menggambarkan persentase kumulatif pendapatan yang diperoleh oleh persentase kumulatif populasi, di mana semakin jauh kurva dari garis kesetaraan sempurna, semakin tinggi ketimpangannya. Nilai Gini Ratio dapat dihitung menggunakan rumus matematis atau pendekatan statistik berbasis data survei rumah tangga. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, semakin besar ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu negara, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Menurut data terbaru, tingkat ketimpangan ekonomi bervariasi di berbagai negara. Negara-negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia memiliki Gini Ratio yang rendah, sekitar 0,25, menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata (OECD, 2022). Sebaliknya, Brasil dan Afrika Selatan memiliki Gini Ratio di atas 0,50, mencerminkan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi (World Bank, 2023). Indonesia berada pada angka sekitar 0,38, yang menandakan ketimpangan sedang, tetapi tetap menjadi perhatian bagi pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi (BPS, 2023). Negara-negara dengan Gini Ratio tinggi sering kali mengalami masalah sosial seperti tingginya tingkat

kejahatan dan rendahnya mobilitas sosial (Wilkinson & Pickett, 2009).

Selain Koefisien Gini, indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dikembangkan oleh UNDP. IPM mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia: umur panjang dan sehat (kesehatan), akses terhadap pengetahuan (pendidikan), serta standar hidup yang layak (pendapatan) (Sen, 1999). Hubungan antara IPM dan ketimpangan ekonomi sangat erat, karena negara dengan IPM rendah cenderung memiliki kesenjangan ekonomi yang lebih besar akibat kurangnya akses terhadap layanan dasar. Misalnya, negara-negara dengan IPM tinggi seperti Norwegia memiliki Gini Ratio yang lebih rendah, sementara negara dengan IPM rendah seperti Nigeria mengalami ketimpangan yang lebih tinggi (UNDP, 2023).

Ketimpangan ekonomi juga dapat dilihat dari distribusi pendapatan dan kekayaan, yaitu bagaimana pendapatan dan aset tersebar di antara berbagai kelompok masyarakat. Menurut Piketty (2014), di banyak negara maju dan berkembang, pendapatan kelompok 1% terkaya meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan bawah. Konsentrasi kekayaan di tangan kelompok elite ini

menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana keuntungan lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang sementara sebagian besar populasi tertinggal. Ketimpangan dalam kepemilikan aset, seperti properti dan saham, juga berkontribusi terhadap meningkatnya kesenjangan ekonomi antar generasi.

Perbandingan distribusi pendapatan antara kelompok ekonomi menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Misalnya, di Amerika Serikat, 1% orang terkaya menguasai lebih dari 20% total pendapatan nasional, sementara 10% terkaya menguasai lebih dari 50% pendapatan (Saez & Zucman, 2019). Sementara itu, 50% penduduk dengan pendapatan terendah hanya memperoleh sekitar 12% dari total pendapatan nasional. Situasi serupa terjadi di negara-negara lain dengan ekonomi besar seperti China dan India, di mana kelompok kaya mengakumulasi kekayaan dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat miskin (World Inequality Report, 2022).

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat terbatas dan kesempatan sosial-ekonomi menjadi tidak merata (Krugman, 2013). Jika kelompok berpenghasilan rendah tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan, dan

modal usaha, maka mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih progresif dalam sistem perpajakan, subsidi bagi kelompok miskin, serta investasi dalam infrastruktur dan pendidikan menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

10.4. Dampak Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, serta kesehatan mental masyarakat. Salah satu dampak sosial yang paling nyata adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan menyebabkan sebagian besar sumber daya ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kelompok miskin kesulitan mengakses peluang ekonomi yang lebih baik (Stiglitz, 2012). Akibatnya, lapangan pekerjaan yang layak semakin sulit diperoleh, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Dalam jangka panjang, kemiskinan yang meningkat dapat memperburuk kondisi sosial, seperti munculnya permukiman kumuh, meningkatnya angka kejahatan,

serta menurunnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Wilkinson & Pickett, 2009).

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut Sen (1999), masyarakat yang berada di kelompok ekonomi bawah sering kali tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang layak, sehingga memperburuk siklus kemiskinan antar generasi. Ketimpangan akses ini menciptakan kesenjangan dalam mobilitas sosial, di mana anak-anak dari keluarga miskin memiliki kemungkinan kecil untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini juga berkontribusi terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara-negara dengan ketimpangan tinggi, karena kualitas sumber daya manusia tidak berkembang secara merata (UNDP, 2023).

Dari sisi ekonomi, ketimpangan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, daya beli masyarakat menengah ke bawah menjadi terbatas, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa menurun (Krugman, 2013). Dalam sistem ekonomi yang sehat, distribusi pendapatan yang lebih

merata dapat meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan bisnis. Namun, jika ketimpangan terlalu tinggi, maka perekonomian menjadi stagnan karena kelompok kaya cenderung lebih banyak menyimpan kekayaannya daripada membelanjakannya (Piketty, 2014).

Ketimpangan ekonomi juga menyebabkan ketidakstabilan pasar dan berkurangnya investasi, yang berakibat pada lemahnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Saez dan Zucman (2019), negara dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung mengalami fluktuasi ekonomi yang lebih besar karena kelompok berpendapatan rendah tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi krisis finansial. Selain itu, ketimpangan yang tinggi sering kali dikaitkan dengan sistem pajak yang kurang progresif, yang memperlambat redistribusi pendapatan dan mengurangi kepercayaan investor terhadap keberlanjutan ekonomi suatu negara.

Dalam aspek politik, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik akibat kesenjangan sosial. Wilkinson dan Pickett (2009) menemukan bahwa negara dengan ketimpangan tinggi lebih rentan terhadap konflik sosial dan ketidakpuasan politik, karena kelompok yang kurang beruntung merasa semakin terpinggirkan. Ketika masyarakat merasa

bahwa sistem ekonomi tidak adil, mereka cenderung melakukan protes sosial, pemogokan, bahkan revolusi politik. Fenomena ini terlihat dalam berbagai peristiwa di dunia, seperti gerakan protes "Occupy Wall Street" di Amerika Serikat yang dipicu oleh ketimpangan ekonomi yang semakin lebar (Stiglitz, 2012).

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga dapat memicu populisme dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada mereka, maka muncul gelombang populisme yang menawarkan solusi instan terhadap masalah ekonomi (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017). Dalam beberapa kasus, populisme menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan, seperti proteksionisme dan peningkatan utang negara untuk mendanai program populis. Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin berkurang ketika ketimpangan ekonomi dikaitkan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik dan bisnis (Acemoglu & Robinson, 2012).

Dampak lain yang sering diabaikan adalah stres sosial akibat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Ketika individu merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan, mereka dapat mengalami stres dan frustrasi yang berkepanjangan (Wilkinson &

Pickett, 2009). Hal ini terjadi terutama di masyarakat yang sangat kompetitif tetapi memiliki ketimpangan tinggi, di mana individu dari kelompok bawah merasa sulit untuk naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Rasa ketidakadilan ini dapat menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Terakhir, ketimpangan ekonomi juga berkontribusi terhadap meningkatnya masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan ketimpangan tinggi memiliki tingkat gangguan kesehatan mental yang lebih besar dibandingkan negara dengan distribusi pendapatan yang lebih merata (Pickett & Wilkinson, 2010). Ketidakpastian ekonomi, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta perasaan terpinggirkan dari sistem sosial dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan ekonomi bukan hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera secara mental.

10.5. Strategi Dan Solusi Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan tantangan global yang membutuhkan strategi komprehensif untuk menguranginya. Salah satu langkah utama yang dapat diambil adalah reformasi sistem perpajakan progresif, di mana pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada individu berpenghasilan tinggi untuk mendanai program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu (Piketty, 2014). Sistem pajak yang adil akan mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan memungkinkan redistribusi pendapatan yang lebih merata (Saez & Zucman, 2019). Selain itu, penguatan transparansi dalam kebijakan perpajakan juga penting agar tidak terjadi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang sering memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajaknya (OECD, 2022).

Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai cara efektif untuk mengatasi ketimpangan jangka panjang (Stiglitz, 2012). Akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas akan meningkatkan mobilitas sosial, sementara layanan kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, terutama bagi

kelompok masyarakat miskin (Sen, 1999). Negara-negara maju yang berhasil mengurangi ketimpangan, seperti negara-negara Skandinavia, menunjukkan bahwa investasi besar dalam sektor ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Wilkinson & Pickett, 2009). Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dasar ini.

Selain itu, subsidi dan program bantuan sosial yang lebih efektif diperlukan untuk membantu masyarakat yang paling rentan (Bourguignon, 2017). Subsidi yang tepat sasaran dalam bidang pangan, pendidikan, dan kesehatan akan membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan (World Bank, 2023). Program seperti bantuan langsung tunai yang diterapkan di beberapa negara berkembang telah terbukti meningkatkan daya beli dan mengurangi kesenjangan pendapatan (BPS, 2023). Namun, untuk menghindari ketergantungan, bantuan sosial harus disertai dengan kebijakan peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja (Todaro & Smith, 2020).

Di sisi lain, sektor swasta memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan dengan mendorong

pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) (Glaeser, 2011). UKM sering kali menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung akses permodalan dan pelatihan bisnis bagi UKM harus diperkuat (Krugman, 2013). Dengan adanya dukungan yang memadai, UKM dapat berkembang dan menciptakan lebih banyak peluang kerja, sehingga mengurangi disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat.

Selain mendorong UKM, perusahaan besar juga harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) yang berkelanjutan untuk memberikan dampak sosial yang positif (Galbraith, 2016). Program CSR yang fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan komunitas lokal, dan pengurangan dampak lingkungan akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif (Saez & Zucman, 2019). Di banyak negara, CSR telah menjadi bagian integral dari kebijakan perusahaan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Atkinson, 2015). Oleh karena itu, regulasi pemerintah yang mendorong pelaksanaan CSR yang lebih luas perlu diperkuat.

Dalam skala global, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia memiliki peran besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara (World Inequality Report, 2022). Program-program yang difasilitasi oleh organisasi ini, seperti bantuan pembangunan dan restrukturisasi utang negara berkembang, dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara miskin (UNDP, 2023). Namun, efektivitas bantuan internasional sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik di negara penerima, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan program-program tersebut (OECD, 2022).

Terakhir, pembelajaran dari negara-negara yang telah berhasil mengurangi ketimpangan harus dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan domestik (Wilkinson & Pickett, 2009). Negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark telah menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang adil, investasi sosial yang kuat, serta peran aktif sektor swasta dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera (Stiglitz, 2012). Dengan menerapkan strategi yang telah terbukti efektif dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal, negara-negara berkembang dapat secara

bertahap mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih berkeadilan (World Bank, 2023).

10.6. Penutup

Ketimpangan ekonomi merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga kesehatan mental. Ketimpangan yang tinggi dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan pengangguran, mempersempit akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan ketidakstabilan pasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga memicu gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas suatu negara, sekaligus meningkatkan risiko masalah psikologis di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab dan dampaknya menjadi langkah awal dalam merancang solusi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, diperlukan pendekatan yang holistik melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah perlu menerapkan sistem perpajakan progresif, memperkuat

program pendidikan dan kesehatan bagi kelompok ekonomi bawah, serta mendorong investasi dalam sektor usaha kecil dan menengah agar lebih banyak masyarakat dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran sektor swasta juga sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih merata dan menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Upaya kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam membangun ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, menciptakan keseimbangan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kesadaran akan pentingnya distribusi kekayaan yang lebih merata harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang, guna menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Dengan mengurangi ketimpangan ekonomi, suatu negara tidak hanya dapat meningkatkan stabilitas sosial dan politik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan harus menjadi agenda prioritas dalam pembangunan ekonomi global maupun

nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2005). Unbundling institutions. *Journal of Political Economy*, 113(5), 949-995. <https://doi.org/10.1086/432166>
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1A, pp. 385-472). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01006-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3)
- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47-100. <https://doi.org/10.1086/700936>
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60(2), 323-351. <https://doi.org/10.2307/2951599>
- Aghion, P., & Howitt, P. (2014). *The Economics of Growth*. MIT Press.
- Aghion, P., Dechezleprêtre, A., Hémous, D., Martin, R., & Van Reenen, J. (2016). Carbon Taxes, Path Dependency, and Directed Technical Change: Evidence from the Auto Industry. *Journal of Political Economy*, 124(1), 1-51. <https://www.jstor.org/stable/26549857>
- Aiginger, K., Rodrik, D. Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century. *J Ind Compet*

Trade 20, 189–207 (2020).
<https://doi.org/10.1007/s10842-019-00322-3>

Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2010). FDI, productivity and financial development. *The World Economy*, 32(1), 111-135.

Amsden, Alice H., *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization* (New York, 1992; online edn, Oxford Academic, 1 Nov. 2003), <https://doi.org/10.1093/0195076036.001.0001>, accessed 11 Mar. 2025
Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177-200.

Aschauer, D. A. (1989). "Is Public Expenditure Productive?" *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200.

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia 2023*. BPS.

Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593-1636.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjw024>

Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv24w655w>

Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The Miracle of Microfinance? Evidence from

a Randomized Evaluation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 22–53.
<http://www.jstor.org/stable/43189512>

Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia*.

Barro, R. J. (1990). "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth." *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125.

Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2023). *Economic growth* (3rd ed.). MIT Press.

Blomström, M., & Kokko, A. (1998). Multinational corporations and spillovers. *Journal of Economic Surveys*, 12(3), 247–277.
<https://doi.org/10.1111/1467-6419.00056>

Bloom, N. (2013). *Fluctuations in Uncertainty*. Social Science Research Network.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.2423515>

Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135.
[https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0)

Bourguignon, F. (2017). *The globalization of inequality*. Princeton University Press.

Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic*

Journal: *Macroeconomics*, 13(1), 333-372. DOI: 10.1257/mac.20180386

Caballero, R. J. (2018). Risk-Centric Macroeconomics and Safe Asset Shortages in the Global Economy: An Illustration of Mechanisms and Policies. *Social Science Research Network*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.3253064>

Calderón, C., & Servén, L. (2010). "Infrastructure and Economic Development in Sub-Saharan Africa." *Journal of African Economies*, 19(Supplement 1), i13-i87.

Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality: An overview. *World Bank Policy Research Working Paper No. 7034*.
<https://hdl.handle.net/10986/20365>

Cambridge University Press. (2020). *Socio-Economic Development (Edisi ke-2)*. Cambridge University Press.

Cavallo, E., & Powell, A. (2018). A new taxonomy of Latin America's economic mysteries. In E. Cavallo & A. Powell (Eds.), *Latin American and Caribbean Macroeconomic Report*. Inter-American Development Bank.
<https://doi.org/10.18235/0001026>

Chang, H. J., & Andreoni, A. (2020). Industrial policy in the 21st century. *Development and Change*, 51(2), 324-351. <https://doi.org/10.1111/dech.12570>

- Chenery, H. B. (2019). *Economic Development and Structural Change: The Policy Perspective*. Oxford University Press.
- Cirera, X., & Maloney, W. F. (2017). The innovation paradox: Developing-country capabilities and the unrealized promise of technological catch-up. World Bank Publications. DOI:10.1596/978-1-4648-1160-9
- Cirera, X., Marotta, D., & Wellenstein, A. (2022). The relationship between intangible capital and productivity at the firm level: Evidence from 85 countries. World Bank Policy Research Working Paper No. 10135.
- Climate Policy Initiative. (2023). Global landscape of climate finance 2023. CPI Report. <https://www.climatepolicyinitiative.org/id/publication/global-landscape-of-climate-finance-2023/>
- Daniel. (2019). Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Definisi, Teori, Ciri-ciri dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://ekonomimanajemen.com/pengertian-pertumbuhan-ekonomi/>
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. M. (2006). Regulation and growth. *Economics Letters*, 92(3), 395-401. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2006.03.021>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, growth, and poverty. *The Economic Journal*, 114(493), F22–F49.

<https://doi.org/10.1111/j.0013-0133.2004.00186.x>

- Domar, E. D. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. *Econometrica*, 14(2), 137-147. <https://doi.org/10.2307/1905364>
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 417-458. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90025-B](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-B)
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485-512. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90027-D](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-D)
- Frederich, R., Nurhayati, & Purba, S. F. (2023). PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(1), 123-136. <https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i1.7227>
- Friedman, T. L. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. Farrar, Straus and Giroux.
- Galbraith, J. K. (2016). *Inequality: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2016). *Global Value Chain Analysis: A Primer*. (2nd ed.)Duke University.
- Glaeser, E. L. (2011). *Triumph of the city: How our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier*. Penguin Press.

- Gramlich, E. M. (1994). "Infrastructure Investment: A Review Essay." *Journal of Economic Literature*, 32(3), 1176–1196.
- Grigg, N. S. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*. New York: Wiley.
- Gupta, S., Kangur, A., Papageorgiou, C., & Wane, A. (2014). Efficiency-adjusted public capital and growth. *World Development*, 57, 164-178. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.11.012>
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (2020). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *The Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83-116. https://www.researchgate.net/publication/5166624_Why_do_some_countries_produce_so_much_more_output_per_worker_than_others_A_note
- Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, 49(193), 14-33. https://www.researchgate.net/publication/274196252_Harrod_1939
- Hasan et al. (2023). *Human Capital Management (Teori dan Aplikasi)*. CV. Media Sains Indonesia
- Held, D., & McGrew, A. (2007). *Globalization / Anti-Globalization: Beyond the Great Divide (2nd Ed.)*. Polity Press.
- Hill, H. (2018). Asia's third giant: A survey of the Indonesian economy. *Economic Record*, 94(307), 469-499.

- Hoff, K., & Stiglitz, J. E. (2001). Modern economic theory and development. In G. M. Meier & J. E. Stiglitz (Eds.), *Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective* (pp. 389-459). Oxford University Press.
- Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and Manufacturing TFP in China and India. *The Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403–1448. <http://www.jstor.org/stable/40506263>
- Iamsiraroj, S., & Ulubaşođlu, M. A. (2015). Foreign direct investment and economic growth: A real relationship or wishful thinking? *Economic Modelling*, 51, 200-213. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.08.009>
- IMF. (2021). *World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries*. International Monetary Fund.
- INDEF. (2024). *Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia Yang Hijau, Inklusif, dan Unggul: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia*. INDEF.
- International Labour Organization. (2023). *The Global Labour Income Share and Distribution*. ILO Data Explorer. <https://webapps.ilo.org/ilostat-files/Documents/Labour%20income%20share%20and%20distribution.pdf>
- International Monetary Fund. (2020). *World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent*. IMF.
- International Monetary Fund. (2023). *Fiscal Monitor: The Nexus between Public and Private Investment*. IMF.

- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
- Kessides, C. (1993). *The Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy Implications*. World Bank Discussion Paper No. 213.
- Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press.
- Krugman, P. (2013). *End this depression now!* W. W. Norton & Company.
- Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (10th ed.). Pearson.
- Kuznets, S. (1955). Linked references are available on JSTOR for this article. *Academy of Management Review*, 65(1), 386–408.
- Lee, K. (2013). *Schumpeterian analysis of economic catch-up: Knowledge, path-creation, and the middle-income trap*. Cambridge University Press.
- Levine, R., & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. *The American Economic Review*, 82(4), 942–963. <http://www.jstor.org/stable/2117352>
- Levy, S., & López-Calva, L. F. (2020). Persistent misallocation and the returns to education in Mexico. *The World Bank Economic Review*, 34(2), 284–311. <https://hdl.handle.net/10986/36711>

- Liana, W., Kusumastuti, S.Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, Judijanto, L., Wartono, T., Suharto, Fitriyana, Hariyono, Milia, J. (2024). Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Lucas, R. E. (1990). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? *The American Economic Review*, 80(2), 92-96. <http://www.jstor.org/stable/2006549>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics (8th ed.)*. Cengage Learning.
- McKinsey Global Institute. (2023). Digital acceleration: Technology investment trends and implications for growth. MGI Report.
- McMillan, M., Rodrik, D., & Verduzco-Gallo, Í. (2014). Globalization, structural change, and productivity growth, with an update on Africa. *World Development*, 63, 11-32. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.012>
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan*. Badan perbit Fakultas Geografi (BPPG) Universitas Gajah Mada.
- N. Gregory Mankiw. (2006). *Pengantar Ekonomi (Edisi 2, J)*. Erlangga, 2003.

- Nübler, I., & International Labour Office. (2014). A theory of capabilities for productive transformation: learning to catch up. In Transforming economies: making industrial policy work for growth, jobs and development. ILO.
- OECD. (2020). Inclusive Growth in the 21st Century. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2022). Income inequality update 2022. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1. OECD Publishing.
- Pertumbuhan Ekonomi: Definisi, Karakteristik Serta Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. (2015).
- Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
- Piketty, T., & Zucman, G. (2014). Capital is back: Wealth-income ratios in rich countries 1700–2010. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(3), 1255-1310. <https://doi.org/10.1093/qje/qju018>
- Pritchett, L. (2000). The Tyranny of Concepts: CUDIE (Cumulated, Depreciated, Investment Effort) Is Not Capital. *Journal of Economic Growth*, 5(4), 361–384. <http://www.jstor.org/stable/40215900>

- Rodrik, D. (2018). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc779z4>
- Rodrik, Dani. (2008). The Real Exchange Rate and Economic Growth. *Brookings Papers on Economic Activity*. 2008. 365-412. 10.1353/eca.0.0020.
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1-33.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102. <https://ssrn.com/abstract=1506720>
- Romer, Paul M. 1994. "The Origins of Endogenous Growth." *Journal of Economic Perspectives* 8 (1): 3–22. DOI: 10.1257/jep.8.1.3
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Saez, E., & Zucman, G. (2019). *The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay*. W. W. Norton & Company.
- Safitri, V., & Noviarita, H. (2022). Modal Manusia: Pendidikan, Kesehatan dalam Pembangunan Ekonomi. *SALAM: Islamic Economics Journal*, Volume 3, No 1, 2022.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sharma, M. (2022). *Theoretical Foundations of Health Education and Health Promotion* (4th ed).

- Stages, T. H. E., & Economic, O. F. (1934). the Economic History Review. *The Economic History Review*, 5 a(1), 1–2. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.1934.tb00857.x>
- Steger, M. B. (2013). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780198849452.001.0001>
- Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company.
- Suparmoko. (n.d.). *Pengantar Ekonomi Makro*. UGM.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (Edisi ke-13). Pearson.
- Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. *Economic Record*, 32(2), 334-361. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

- UNCTAD (2020). World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNDP. (2023). Human development report 2023. United Nations Development Programme.
- United Nations Environment Programme. (2022). Adaptation Gap Report 2022. UNEP.
- United Nations Industrial Development Organization. (2022). Industrial Development Report 2022. UNIDO.
- Universitas Airlangga. (2023). SDGs Series: Pilar Pembangunan Ekonomi. Universitas Airlangga.
- Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). The spirit level: Why more equal societies almost always do better. Bloomsbury Press.
- World Bank. (1993). The East Asian miracle: Economic growth and public policy. Oxford University Press.
- World Bank. (1994). World Development Report 1994: Infrastructure for Development. Oxford University Press.
- World Bank. (2020). World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. World Bank Group.
- World Bank. (2022). Indonesia Economic Prospects: Mobilizing Resources for Growth and Inclusion.

- World Bank. (2023). World development report 2023: Migrants, refugees, and societies. The World Bank.
- World Bank. (2024). World Development Indicators. World Bank.
- World Inequality Lab. (2022). World inequality report 2022. Paris School of Economics.
- World Trade Organization (WTO). (2019). World Trade Report 2019: The Future of Trade in a Digital World. WTO.
- WTO. (2019). World Trade Report 2019: The Future of Trade in a Digital World. World Trade Organization
- Aurelya, T., Nurhayati, N., & Purba, S. F. (2022). Pengaruh Kondisi Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 83–92. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.752>
- Zhu, X. (2012). Understanding China's growth: Past, present, and future. *Journal of Economic Perspectives*, 26(4), 103-124. DOI:10.2307/23290282
- Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5500>

DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai teori pertumbuhan ekonomi klasik hingga modern, serta melihat bagaimana variabel-variabel seperti investasi, konsumsi, tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan pemerintah saling berinteraksi dalam memengaruhi laju pertumbuhan suatu negara. Selain itu, dibahas pula isu-isu kontemporer seperti ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, dan dampak globalisasi terhadap ekonomi domestik. Buku ini dirancang agar dapat diakses oleh kalangan umum dengan bahasa yang sederhana namun tetap mengedepankan kedalaman analisis.

Pertumbuhan ekonomi bukanlah sebuah proses yang statis, melainkan dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat luas untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai dinamika ini, agar mampu membaca arah kebijakan ekonomi serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Buku ini diharapkan menjadi jembatan pengetahuan bagi siapa saja yang ingin memahami ekonomi secara lebih utuh, tanpa harus memiliki latar belakang akademik ekonomi yang mendalam.



IKAPI
IKATAN AHLI EKONOMI INDONESIA



CV REY MEDIA GRAFIKA
EMAIL:
REYMEDIAGRAFIKA.RGM@GMAIL.COM

ISBN 978-634-7180-32-2



9

786347

180322